

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TAPIN**



**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu**

Alamat : Jl. Brigjend. H. Hasan Basry No.22 Rantau -  
Kalimantan Selatan

Nomor Telepon : (0517) 2035936

*Website* : [www.dpmpptsp.profiletapinkab.go.id](http://www.dpmpptsp.profiletapinkab.go.id)

*E-mail* : [dpmpptsp.tapin@gmail.com](mailto:dpmpptsp.tapin@gmail.com)




LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

# LKJIP

---

# 2024

DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPIN

 Jl. Brigjend. H. Hasan Basry No.22  
Rantau - Kalimantan Selatan

 [dpmpmsp.tapin@gmail.com](mailto:dpmpmsp.tapin@gmail.com)

 [dpmpmsp.profile.tapinkab.go.id](http://dpmpmsp.profile.tapinkab.go.id)

 [@dpmpmsp.tapin](https://www.instagram.com/dpmpmsp.tapin)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan dapat diselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Tapin Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dan mengetahui kelemahan untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang.

LKjIP tahun 2024 ini disusun dengan mengukur capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Strategik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaannya di masa mendatang. Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini, baik yang secara aktif terlibat langsung dalam perumusannya, Dan kita mengharapkan, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau, Februari 2024  
Kepala DPMPTSP



Hj. Fauziah, S.Sos, M.AP  
NIP. 19660107 198703 2 008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2.2 Anggaran.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Dasar Hukum .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Sistematika Laporan Kinerja .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 .....</b>	<b>17</b>
<b>2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
<b>3.1 Capaian Kinerja .....</b>	<b>30</b>
<b>3.1.1 Skala Capaian Kinerja .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun     pelaporan.....</b>	<b>31</b>
<b>3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian     kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa     tahun terakhir .....</b>	<b>44</b>

3.1.4	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	45
3.1.5	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	51
3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	52
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	55
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	58
3.2	Realisasi Anggaran .....	88
BAB IV PENUTUP .....		91
LAMPIRAN .....		94

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b> Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n .....	8
<b>Tabel 2.1</b> Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis .....	12
<b>Tabel 2.2</b> Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024....	14
<b>Tabel 2.3</b> Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	17
<b>Tabel 2.4</b> Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah.....	17
<b>Tabel 2.5</b> Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	24
<b>Tabel 3.1</b> Pengkategorian Capaian Kinerja .....	31
<b>Tabel 3.2</b> Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	31
<b>Tabel 3.3</b> Perbandingan Capaian Kinerja .....	44
<b>Tabel 3.4</b> Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	49
<b>Tabel 3.5</b> Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota .....	51
<b>Tabel 3.6</b> Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi .....	52
<b>Tabel 3.7</b> Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	55
<b>Tabel 3.8</b> Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	58
<b>Tabel 3.9</b> Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	7
Gambar 3.1 Kegiatan Pengawasan ke Pelaku Usaha .....	66
Gambar 3.2 Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian LKPM ...	67
Gambar 3.3 Kegiatan Promosi .....	69
Gambar 3.4 FGD Kajian Peta Potensi.....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).



Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun n yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## **1.2 Penjelasan Umum Organisasi**

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin . Dinas ini sebagai perubahan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, sebagai lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

Untuk memperbaiki birokrasi perizinan, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Inpres ini memberikan instruksi kepada Kementrian dan Lembaga untuk segera melakukan berbagai tindakan yang dibutuhkan sehingga iklim investasi lebih bergairah. Salah satu Inpres tersebut memuat tentang Percepatan Perizinan kegiatan usaha dan Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia.

Untuk melaksanakan Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tersebut memberikan Stimulan bagi Pemerintah Daerah untuk segera melakukan Penyederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ).

Dalam rangka pelaksanaan amanat Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Tapin menerbitkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 148 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu. Tim Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan cikal bakal pelaksanaan pelayanan perizinan secara terpadu di Kabupaten Tapin dan bersifat sementara sampai dibentuknya suatu lembaga perizinan terpadu yang definitif. Kewenangan perizinan yang ditangani oleh Tim Pelayanan Perizinan Terpadu, diatur melalui Keputusan Bupati Tapin Nomor 188 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Pelayanan Perizinan melalui Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin, yaitu :

1. SITU ( Surat Ijin Tempat Usaha )
2. Ijin Reklame
3. Ijin Gangguan ( HO )
4. Ijin KP Penyelidikan Umum
5. Ijin KP Ekspolasi (Sebagai Peningkatan KP Penyelidikan Umum )
6. Perpanjangan KP Ekspolarasi
7. Ijin KP Ekspolaitasi ( Peningkatan KP Eksplorasi )
8. Perpanjangan Ijin KP Ekspoitasi
9. Izin Angkutan Pedesaan
10. Izin Pembangunan Jalan Perusahaan

Pembentukan Lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin didasari oleh amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, yang salah satu Diktumnya mengatur Tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Secara ringkas, dasar hukum pembentukan Dinas dan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong,
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
4. INPRES No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Peraturan Daerah,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tapin
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin,
11. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin,
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten tapin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakn teknis penanaman modal, data, informasi dan primosi dan PTSP;

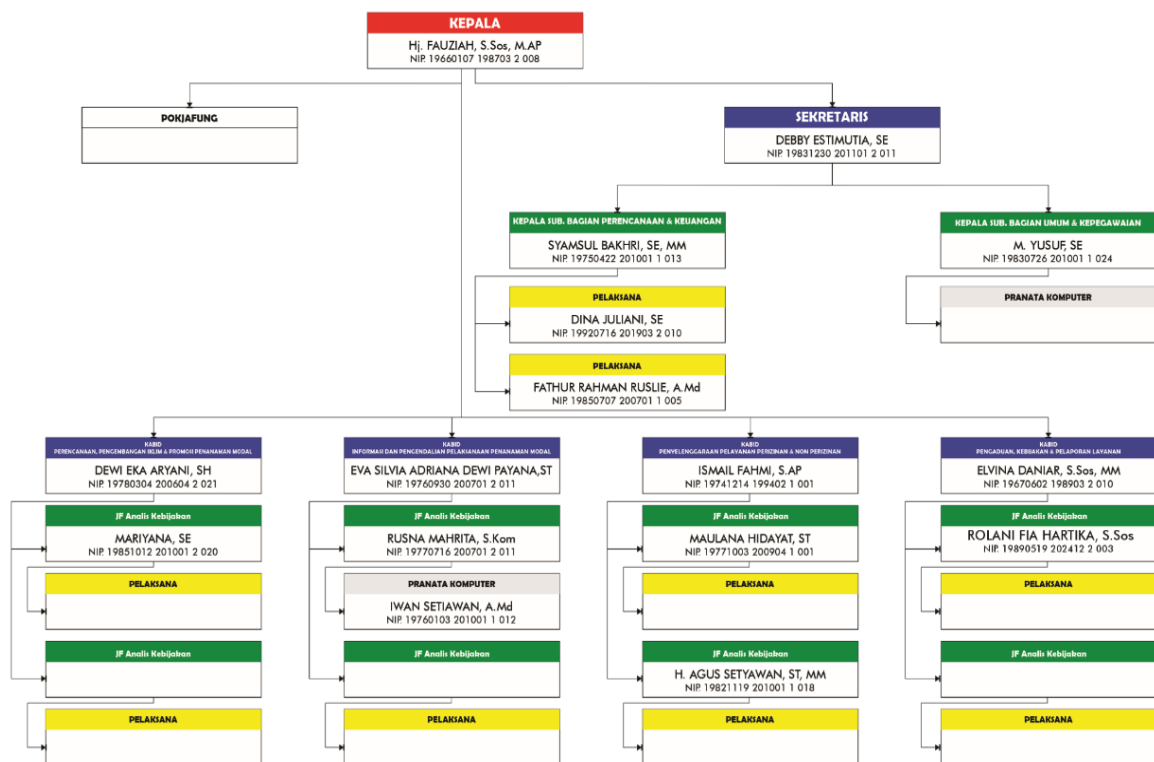
- b. Mongoordinasikan membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penanaman modal;
- c. Mongoordinasikan membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis data, informasi dan promosi;
- d. Mongoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis PTSP;
- e. Mongoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan PTSP;
- f. Mongoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, data, informasi dan promosi dan PTSP;
- g. Mongoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, data, informasi dan promosi dan PTSP;
- h. Membina dan pengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain jsesuai bidang tugas dan kewenanannya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan perencanaan bidang penanaman modal dan PTSP;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan PTSP;
- c. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan PTSP;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
- e. pengelolaan kesekretariatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tapin

### 1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**TABEL 1.1 PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN N-1 DAN TAHUN N**

<b>Sumber</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp10.747.366.105
APBD	Tahun 2024	Rp7.963.134.905

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tapin

### **1.3 Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

### **1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2023**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Tapin Nomor:700.1.2.1/038/Evaluasi SAKIP/Wil.I/INSP/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024. DPMPTSP memperoleh nilai 79,70 dengan kategori BB. Adapun saran/rekomendasi serta tindak lanjut yang

telah dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam rangka peningkatan Akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

NO	SARAN/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Meningkatkan dan Memperluas Crosscutting dengan unit kerja yang lain dalam meningkatkan pencapaian kinerja	Dalam meningkatkan capaian kinerja DPMPTSP telah melakukan crosscutting kinerja yang berkaitan dengan penerbitan pelayanan perizinan. Koordinasi terkait pelaksanaan perizinan di daerah dengan OPD teknis.

### 1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun n adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.



### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN**

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Dalam rencana strategis DPMPTSP termuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai DPMPTSP pada masa tiga tahun kedepan.

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran DPMPTSP Kabupaten Tapin 2024-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
4. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin:

**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Peran Investasi Daerah Dalam Pembangunan Perekonomian			Persentase peningkatan investasi daerah (%) Meningkatnya Peran Investasi Daerah Dalam Pembangunan Perekonomian	5	5	5
			Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA dan PMDN	1.530	1.600	1.680
				Persentase peningkatan investasi daerah (%)	5	5	5
2.	Meningkatkan Pelayanan Perizinan			Meningkatkan Pelayanan Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87,5	88	89
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan	87,5	88	89

3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	80,5	81
		1.	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (perencanaan kinerja)	23,9	24	24
				Nilai Komponen AKIP (pengukuran kinerja)	23,9	24	24
				Nilai Komponen AKIP (pelaporan kinerja)	12,25	12,50	13
				Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	16,95	20	20
4.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	67	70
				Indek Profesionalisme ASN DPMPTSP	65	67	70

Sumber : Renstra DPMPTSP Periode 2024-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp Milyar	Akumulasi nilai investasi PMA dan PMDN triwulan I, triwulan II, triwulan III triwulan IV. Data diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM disetujui) pada OSS.	Nilai investasi PMDN dan PMA yang masuk dalam nilai investasi yaitu tambahan modal tetap pada LKPM yang disampaikan perusahaan kategori non-UMK setiap triwulan	OSS LKPM (Bidang Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal)
		Persentase peningkatan investasi daerah (%)	Persentase (%)	Selisih antara total nilai investasi PMDN dan PMA tahun n dikurangi dengan total Nilai Investasi PMDN dan PMA investasi tahun n1 dibagi dengan nilai investai PMDN dan PMA tahun n-1 dikali seratus persen.	$\frac{\text{Jumlah PMDN dan PMA tahun } n - \text{Jumlah PMDN dan PMA tahun } n-1}{\text{Jumlah PMDN dan PMA tahun } n} \times 100\%$	OSS LKPM (Bidang Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal)

2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan	Poin	<p>Laporan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang diperoleh dari Laporan Suvei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Nilai Interval Konversi IKM :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 - 64.99 D Tidak Baik</li> <li>• 65 - 76.60 C Kurang Baik</li> <li>• 76.61 - 88.30 B Baik</li> <li>• 88.31 - 100.00 A Sangat Baik</li> </ul>	<p>Laporan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang diperoleh dari Laporan Suvei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Nilai Interval Konversi IKM :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 - 64.99 D Tidak Baik</li> <li>• 65 - 76.60 C Kurang Baik</li> <li>• 76.61 - 88.30 B Baik</li> <li>• 88.31 - 100.00 A Sangat Baik</li> </ul>	LAPORAN SKM (Bidang Pengaduan. Kebijakan dan Pelaporan Layanan)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	<p>Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sintem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.</p> <p>Nilai diperoleh dari hasil laporan evaluasi SAKIP DPMPTSP oleh Inspektorat</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPMPTSP oleh Inspektorat Kabupaten Tapin	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPMPTSP oleh Inspektorat Kabupaten Tapin

4.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata IP ASN DPMPTSP Kabupaten Tapin	$\frac{\text{Jumlah IP ASN seluruh ASN}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Nilai IP ASN dari aplikasi myasn.bkn.go.id
----	---	--	--	--	---	--

Sumber: Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2024

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Tahun 2024 :

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu**

No		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp Milyar	1.530
		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	5
(2)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan	87,5	88,98
(3)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	79,79
(4)	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	76,11

Sumber : Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih



baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024**

Jabatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<i>Kepala Dinas</i>	Meningkatnya peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian	Persentase peningkatan investasi daerah	5%	24,87%
		Nilai Investasi Penanaman Moda Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp 1.530 Milyar	Rp 1.829,26 Milyar
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan	87,5	88,98
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	79,70
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	76,11
<i>Sekretaris</i>	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	23,9	23,7
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	23,9	24
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	12,25	12
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	16,95	20
	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%	100%
	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	85	83
<i>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</i>	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%	100%
	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	90%	100%

<i>Kasubbag Perencanaan dan Keuangan</i>	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	100%
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	100%
	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%
	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%
<i>Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal</i>	Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal Yang Sesuai Ketentuan	100%	100%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM promosi investasi daerah	Persentase SDM promosi investasi daerah yang bersertifikat	100%	100%
	Meningkatnya Peluang Kemitraan Bagi UMKM Dengan Perusahaan	Jumlah UMKM yang Bermitra dengan Perusahaan	4	4
<i>Analisis Kebijakan</i>	Meningkatnya potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan	Persentase Potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan	100%	100%
	Meningkatnya standar data peluang potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal	Persentase data peluang potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang memenuhi standarisasi	100%	100%
	Tersedianya Kajian Potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal	Persentase dokumen kajian potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang sesuai ketentuan	100%	100%
	Terlaksananya penyusunan data potensi unggulan daerah	Persentase dokumen potensi unggulan daerah yang baik	100%	100%
<i>Analisis Kebijakan</i>	Tersedianya Media promosi penanaman modal	Persentase Media Promosi Penanaman Modal yang baik	100%	100%

	Terlaksananya Penyusunan Pemetaan Kebutuhan Media Promosi	Jumlah pemetaan media promosi yang tersusun	3	3
	Meningkatnya usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengajukan proposal kemitraan	Persentase usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengajukan proposal kemitraan yang disetujui	100%	100%
	Terlaksananya Sosialisasi tentang Kemitraan UMKM dengan Perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin	Jumlah sosialisasi fasilitasi kemitraan yang sesuai ketentuan	1	1
	Meningkatnya Koordinasi tentang Kemitraan UMKM dengan Perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin	Jumlah koordinasi peluang kemitraan yang dilaksanakan	5	10
	Meningkatnya pengikutsertaan pelatihan promosi investasi	Jumlah SDM Promosi yang Mengikuti Pelatihan	5	5
	Terlaksananya fasilitasi UMKM yang akan diajukan kemitraan	Persentase UMKM yang difasilitasi	100%	100%
	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	1
	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	3
	Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	4	4
<i>Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin	80%	80%
		Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui	100%	100%
<i>Analisis Kebijakan</i>	Meningkatnya penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	Persentase pelaku usaha yang dibina menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	100%	100%
		Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi kegiatan penanaman modal (LKPM) yang lulus passing grade	100%	100%
	Terlaksananya sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi LKPM	100	110
	Optimalnya Pengawasan pada Pelaku Usaha	Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang ditindak lanjuti Pelaku Usaha	80%	80%

<i>Analisis Kebijakan</i>	Terlaksananya pengawasan terhadap pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	42	42
	Tersedianya data pelaku usaha yang akan dipantau	Persentase data pelaku usaha yang akan dipantau sesuai ketentuan	100%	100%
	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	30	0
	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100	110
	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah di analisa dan diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan; Serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	42	42
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	12
<i>Kepala Bidang Pengaduan. Kebijakan dan Pelaporan Layanan</i>	Meningkatnya kebijakan penanaman modal yang terbaru	Jumlah naskah akademik yang terselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Optimalnya penyebaran Informasi Pelayanan Publik	Persentase Penyebaran Informasi Pelayanan Publik yang dipenuhi	100%	100%
	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil SKM	Persentase realisasi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	100%
<i>Analisis Kebijakan</i>	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan	Persentase data pengaduan tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti	100%	100%
	Terlaksananya Monitoring Evaluasi SKM	Jumlah monitoring evaluasi SKM	4	4
	Tersedianya Sarana Pengaduan Pelayanan Publik yang efektif	Persentase sarana pengaduan yang efektif	100%	100%

	Terlaksananya monitoring evaluasi tindak lanjut pengaduan	Jumlah monitoring tindak lanjut pengaduan	4	1 Dokumen
	Terlaksananya koordinasi dengan stakeholder/ instansi terkait	Persentase pengaduan yang dikooridinaskan	100%	100%
	Tersedianya data Kebijakan Pelayanan Publik	Persentase Data Kebijakan Pelayanan Publik yang sesuai ketentuan	100%	100%
	Tersedianya media informasi Kebijakan Pelayanan Publik	Jumlah media informasi Kebijakan Pelayanan publik yang tersedia	3	3
	Terlaksananya monitoring evaluasi data kebijakan pelayanan publik	Jumlah monitoring evaluasi data Kebijakan Pelayanan Publik	4	4
	Meningkatnya koordinasi Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal yang Terbaru	Persentase koordinasi penyusunan Kebijakan Penanaman Modal sesuai ketentuan	100%	100%
	Terlaksananya Uji Publik Terkait Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Uji Publik Kebijakan Penanaman Modal yang dilaksanakan	1	1
	Tersedianya perencanaan kebijakan penanaman modal berdasarkan regulasi terbaru	Jumlah perencanaan kebijakan penanaman modal yang akan dibuat naskah akademik	1	1
	Tersedianya dan terkelolanya layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10	12
	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1
<i>Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan</i>	Optimalnya pelayanan penerbitan perizinan	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Berbasis Elektronik	75%	77,22%
	Meningkatnya Kapasitas SDM Terkait Teknis/ Non Teknis Pelayanan	Persentase SDM teknis dan non teknis yang kompeten	100%	100%
	Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan perizinan daerah	Persentase sinkronisasi perizinan daerah	100%	100%
<i>Analis Kebijakan</i>	Terlaksananya Koordinasi yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah	Persentase Koordinasi permasalahan yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah	100%	100%

<i>Analis Kebijakan</i>	Terlaksananya Penelaahan Kebijakan Pusat dan Daerah yang terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah	Persentase Kebijakan Pusat dan Daerah yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah yang Ditelaah	100%	100%
	Tersedianya Sistem Layanan Perizinan	Persentase Layanan Perizinan Yang Berbasis Elektronik	75%	75%
	Tersedianya media informasi layanan perizinan berbasis elektronik	Persentase informasi layanan perizinan berbasis elektronik yang tersedia	100%	100%
	Tersedianya layanan berbantuan (helpdesk) perizinan berbasis elektronik	Persentase layanan berbantuan (helpdesk) perizinan yang terpenuhi	100%	100%
	Terlaksananya Bimbingan Teknis SDM Terkait Teknis/ Non Teknis Pelayanan	Persentase SDM yang mengikuti Bimbingan teknis/ Pelatihan yang bersertifikat	100%	100%
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500	1500
<i>Bendahara Pengeluaran</i>	Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1500	1500
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	2
<i>Staf Perencanaan</i>	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	11
<i>Pranata Komputer</i>	Melakukan Penggandaan data dan program (0,013/25Kb)	Jumlah penggandaan data & program(0,013/25Kb)	100	100
	Membuat laporan operasi komputer (0,013/laporan)	Jumlah laporan operasi komputer(0,013/laporan)	100	100
	Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer (0,048/dokumen)	Jumlah dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer(0,048/dokumen)	100	100

Melakukan perekaman data dengan validasi (0,001/1000 karakter)	Jumlah Perekaman data dengan validasi (0,001/1000 karakter)	100	100
Melakukan perekaman data tanpa validasi (0,004/1000 karakter)	Jumlah perekaman data tanpa validasi (0,004/1000 karakter)	100	100
Perekaman data (0.013/25 KB)	Jumlah Perekaman data (0,013/25 KB)	100	100
Perbaikan dan pendeteksian (0,006)	Jumlah Perbaikan dan Pendektesian (0,006)	100	100

Sumber : Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENJA	
		Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	23,9 Score
2		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	23,9 Score
3		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	12,25 Score
4		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	16,95 Score
5		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %
6		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100 %
7		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	85 Poin
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %

9		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	%
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	Orang
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Laporan
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100	%
13		Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	100	%
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket
17	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	Paket
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100	%
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	90	%
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Unit
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	Unit
26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	90	%



27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23	Unit
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit
29	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100	%
30		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100	%
31		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100	%
32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	Laporan
33	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan perizinan yang berbasis elektronik sesuai ketentuan	75	%
34		Persentase SDM teknis dan non teknis yang kompeten	100	%
35		Persentase sinkronisasi perizinan daerah	100	%
36		Persentase Penyebaran Informasi Pelayanan Publik yang dipenuhi	100	%
37		Persentase realisasi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100	%
38		Persentase data pengaduan tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti	100	%
39	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan perizinan yang berbasis elektronik	75	%
40		Persentase informasi layanan perizinan berbasis elektronik yang tersedia	100	%
41		Persentase layanan berbantuan (helpdesk) perizinan yang dipenuhi	100	%
42		Persentase SDM yang mengikuti Bimbingan teknis/ Pelatihan yang bersertifikat	100	%
43		Persentase Koordinasi permasalahan yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah	100	%
44		Persentase Kebijakan Pusat dan Daerah yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah yang Ditelaah	100	%
45		Jumlah monitoring evaluasi SKM	4	kali

46		Persentase sarana pengaduan yang efektif	100	%
47		Jumlah monitoring tindak lanjut pengaduan	4	kali
48		Persentase pengaduan yang dikoordinasikan	100	%
49		Persentase Data Kebijakan Pelayanan Publik yang sesuai ketentuan	100	%
50		Jumlah media informasi kebijakan pelayanan publik yang tersedia	3	media
51		Jumlah monitoring evaluasi data kebijakan pelayanan publik	4	kali
52	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	1500	Pelaku Usaha
53	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	10	Pelaku Usaha
54	Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1500	Kegiatan usaha
55	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin	80	%
56	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik	Persentase data pengawasan pelaku usaha yang tersedia	100	%
57	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Dokumen
58	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah UMKM yang Bermitra dengan Perusahaan	4	perusahaan
59		Persentase Potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan	100	%
60		Jumlah naskah akademik yang terselesaikan	1	Dokumen
61	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal Sesuai Ketentuan	100	%

62		Jumlah Uji Publik Kebijakan Penanaman Modal yang Dilaksanakan	1	Kali
63		Jumlah Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal yang akan dibuat naskah akademik	1	Dokumen
64		Persentase usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengajukan proposal kemitraan yang disetujui	100	%
65		Jumlah sosialisasi fasilitasi kemitraan yang sesuai ketentuan	1	kali
66		Jumlah koordinasi peluang kemitraan yang dilaksanakan	5	kali
67		Persentase UMKM yang difasilitasi	100	%
68	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen
69	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	4	Kegiatan usaha
70	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase data peluang potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang memenuhi standarisasi	100	%
71		Persentase dokumen kajian potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang sesuai ketentuan	100	%
72		Persentase dokumen potensi unggulan daerah yang baik	100	%
73	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen
74	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin	80	%
75		Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disetujui	100	%
76	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang dibina menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100	%
77		Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang lulus Passing Grade	100	%
78		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi LKPM	100	%
79		Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang yang ditindak lanjuti Pelaku Usaha	80	%

80		Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	42	%
81	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	30	Pelaku Usaha
82	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100	Pelaku Usaha
83	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah di analisa dan diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan; Serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	42	Kegiatan usaha
84	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase promosi penanaman modal yang sesuai ketentuan	100	%
85		Persentase SDM promosi investasi daerah yang bersertifikat	100	%
86	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Media Promosi Penanaman Modal yang baik	100	%
87		Jumlah pemetaan media promosi yang tersusun	3	media
		Jumlah SDM Promosi yang Mengikuti Pelatihan	5	Orang
88	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	dokumen

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp 1.530 Milyar	Rp 1.829,26 Milyar	119,56%	Sangat Tinggi	OSS LKPM (Bidang Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal)
		Persentase peningkatan investasi daerah (%)	5%	24,87%	497,40%	Sangat Tinggi	OSS LKPM (Bidang Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal)

2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan	87,5	88,98	101,69%	Sangat Tinggi	LAPORAN SKM (Bidang Pengaduan. Kebijakan dan Pelaporan Layanan)
3	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (perencanaan kinerja)	77	79,70	103,51	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPMPTSP oleh Inspektorat Kabupaten Tapin
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indek Profesionalisme ASN DPMPTSP	65	76,11	117,09%	Sangat Tinggi	Nilai IP ASN dari aplikasi myasn.bkn.go.id

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tapin

**1. Sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Tapin yang pertama yaitu “Meningkatnya Nilai Investasi Daerah” dengan indikator kinerja yaitu Nilai Investasi PMA dan PMDN dan Persentase peningkatan investasi daerah (%).**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator pertama “Nilai Investasi PMA dan PMDN” realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.1829,26 Milyarm dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.530 milyar. Capaian kinerja sebesar 119,25%. Nilai realisasi investasi tersebut terdiri dari investasi PMDN sebesar Rp 1.755,43 Milyar dan PMA sebesar Rp 73,83 Milyar.

Indikator kedua yaitu Persentase peningkatan investasi daerah dengan realisasi tahun 2024 yaitu 24,87% dengan target 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di Kabupaten Tapin Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh DPMPTS Kabupaten Tapin agar target realisasi investasi tercapai yaitu meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam melaporkan investasi pada tahun 2024. Para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal setiap triwulannya, sehingga dapat

diketahui berapa nilai investasi yang masuk baik dari PMA maupun PMDN. Adapun beberapa kegiatan yang menunjang sebagai berikut :

1. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha

Peserta Bimbingan Teknis diikuti oleh Pelaku Usaha di Kabupaten Tapin, baik skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar ataupun Bentuk Badan Usaha. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha/ perusahaan agar menyampaikan LKPM dengan melaksanakan sosialisasi tata cara pengisian LKPM. selain itu bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam sistem OSS juga disediakan layanan berbantuan

2. Melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan kepada Pelaku Usaha

Pelaksanaan Pengawasan didampingi oleh Tim Teknis Organisasi Perangkat Daerah terkait, dan untuk Perusahaan yang dikunjungi berdasarkan system Aplikasi OSS, yang diverifikasi oleh Pelaku Usaha dan Tim Teknis Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Tujuan dilaksanakan Pengawasan untuk memastikan lokasi dan kewajiban untuk pelaporan kegiatan Penanaman Modal Perusahaan yang sedang berjalan. Melalui pengawasan ini DPMPTSP menyampaikan hal-hal terkait kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan LKPM.

Berikut Hasil Rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Tapin Tahun 2024 :

**1. PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

NO	NAMA PERUSAHAAN (KBLI)	ALAMAT	PERIODE / TRIWULAN	REALISASI PMA
1	PT. KHARISMA INTI USAHA '10431	Desa Binuang Kab. Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 3.575.734.205
			TW II	Rp 14.954.279.963
			TW III	Rp 5.409.288.655
			TW IV	Rp 4.118.339.439
	PT. KHARISMA INTI USAHA '01262	Kelurahan Binuang, Karang Putih, Raya Belanti, Pulau Pinang,	TW I	Rp 11.196.456.650



		Sei Bahalang, Sukaramai, Pematang Karangan, Pandahan, Sei Salai, Keladan, Kecamatan Binuang, Tapin Tengah dan Candi Laras Utara Kalimantan Selatan	TW II	Rp	9.376.619.292		
			TW III	Rp	16.360.892.087		
			TW IV	Rp	7.967.986.054		
2	PT. PUTRA BANGUN BERSAMA '01262	Desa Keladan, Sungai Salai Hilir, Sungai Salai, Sungai Puting, Pandahan dan Pematang Karangan Hilir, Kecamatan Candi Laras Utara dan Tapin Tengah. Kab. Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp	252.264.157		
			TW II	Rp	234.000.000		
			TW IV	Rp	349.569.554		
3	CENTRATAMA MENARA INDONESIA 42206	Tangkawang Lama RT.03 RW.02	TW IV	Rp	10.506.781,00		
				Ds Sungai Salai Hilir Rt 01/001	TW IV	Rp	10.504.415,00
				Jl. Margasari Rantau Rt. 01 Rw. 01 desa marampiauw kec candi Laras selatan kab Tapin propinsi Kalimantan selatan		Rp	10.503.375,00
4	SYARIAH BERLIAN UTAMA 68111	Jl. Bypass RT 001		Rp	100.000,00		
<b>TOTAL PMA</b>				<b>Rp</b>	<b>73.827.044.627</b>		

## 2. PMDN (PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI)

NO	NAMA PERUSAHAAN (KBLI)	ALAMAT	PERIODE / TRIWULAN	REALISASI PMDN
1	PT. ANTANG GUNUNG MERATUS '05100	DESA SALAM BABARIS KAB. TAPIN KALIMANTAN SELATAN	TW I	Rp 45.834.859.989
			TW II	Rp 34.677.587.719
				Rp 34.677.587.719
2	PT. KHARISMA ALAM PERSADA '10431	DESA BINUANG KAB. TAPIN KALIMANTAN SELATAN	TW I	Rp 11.032.125.000
			TW II	Rp 275.250.000

			TW IV	Rp 11.376.000
			TW IV	Rp 11.376.000
	01262	Kelurahan Binuang, Karang Putih, Raya Belanti, Pulau Pinang, Sei Bahalang, Sukaramai, Pematang Karang, Pandahan, Sei Salai, Keladan, Kecamatan Binuang, Tapin Tengah dan Candi Laras Utara Kalimantan Selatan	TW I	Rp 112.835.000
			TW II	Rp 6.509.214.947
	10432		TW IV	Rp 5.477.308.311
			TW IV	Rp 11.376.000
3	ALADDIN BERKAH CAHAYA '09900	JL. HAULING HASNUR KM.30 KAB. TAPIN KALIMANTAN SELATAN	TW I	Rp 100.000.000
	05100		TW I	Rp 950.000.000
4	CAKRAWALA PUTRA BERSAMA '77395	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 2.390.477.325
			TW II	Rp 5.794.152.764
			TW IV	Rp 231.279.455
	09100	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 83.500.000
			TW II	Rp 827.736.109
			TW III	Rp 17.074.224.499
			TW IV	Rp 462.558.910
	33122	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW III	Rp 8.537.112.249
5	PT. PLANTINDO AGRO SUBUR '01262	Teluk Haur , kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 26.615.884.880
			TW III	Rp 7.272.479.407
			TW IV	Rp 530.607.928
6	PT. ENERGI BATU BARA LESTARI '05100	DESA SHABAH KAB.TAPIN KALIMANTAN SELATAN	TW I	Rp 49.380.000.000
				Rp 46.880.000.000
				Rp 46.880.000.000
				Rp 49.380.000.000
				Rp 17.500.000.000
				Rp 17.500.000.000
				Rp 17.500.000.000
				Rp 17.500.000.000
				Rp 21.150.159.098
				Rp 15.512.236.678
			Rp 16.430.181.068	
TW II	Rp 3.615.698.459			
7	PT. CIPTA KRIDATAMA '09900	DESA PUALAM SARI KAB.TAPIN KALIMANTAN SELATAN	TW I	Rp 410.279.566.121
				Rp 410.279.566.121
			TW II	Rp 255.612.096.801
			TW III	Rp 16.306.891
			TW IV	Rp 9.438.611

8	PT. SAHABAT MEMBANGUN BERSAMA 09900	Jalan Ahmad Yani Km 94 Desa Pulau Pinang, Kec. Binuang, Kab. Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 5.675.000
			TW II	Rp 2.193.213.600
			TW III	Rp 1.555.800.000
9	PT. TAPIN SUTHRA BERJAYA '46610	Jalan Jendral Sudirman By Pass Bungur, RT.02/RW.01, Desa Bungur, Kecamatan Bungur, Rantau, Kab. Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 29.359.000
			TW II	Rp 518.698.198
			TW IV	Rp 422.944.270
10	PT. MITRA PROFITAMAS MOTOR '45301	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 401.883.022
			TW II	Rp 300.400.090
			TW III	Rp 7.240.514
			TW IV	Rp 24.842.546
	45101	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 403.193.732
			TW II	Rp 337.459.092
			TW III	Rp 19.220.542
			TW IV	Rp 20.640.530
	45201	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 402.922.314
			TW II	Rp 287.059.000
			TW III	Rp 6.220.580
			TW IV	Rp 18.731.539
11	PT. ANUGERAH BINUANG MULIA '09900	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 911.471.965
			TW II	Rp 12.080.000
			TW III	Rp 175.000
			TW IV	Rp 2.925.820
	77395	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW II	Rp 9.900.000
			TW III	Rp 125.000
TW IV	Rp 2.931.830			
12	PT. TRI BUANA MAS '01262	DESA BATALAS, KEC. CANDI LARAS UTARA, KAB. TAPIN, PROP. KALIMANTAN SELATAN	TW II	Rp 7.083.852.966
13	PT. BHUMI RANTAU ENERGI 05100	Desa Baramban Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan	TW I	Rp 27.780.939.177
			TW II	Rp 2.686.801.917
			TW III	Rp 2.434.215.000
			TW IV	Rp 3.454.487.123
	46610		TW III	Rp 1
			TW III	Rp 1
			TW IV	Rp 1
			TW IV	Rp 1
14	PT. BATU GUNUNG MULIA ENERGI '09900	JL.A. Yani Km. 94	TW I	Rp 219.834.000
			TW II	Rp 1.864.387.460
			TW III	Rp 72.012.000
			TW IV	Rp 1

15	PT. HASNUR RESOURCES TERMINAL '52221	JL. Hauling Hasnur Km.1	TW I	Rp 640.395.507
			TW II	Rp 911.933.768
16	CV. ZAM ZAM AIR MULIA 09900	DESA SHABAH KAB.TAPIN KALIMANTAN SELATAN	TW I	Rp 552.598.000
			TW II	Rp 675.334.500
			TW III	Rp 902.724.012
17	PT. PERSADA SOKKA TAMA '42206	JL. AHMAD YANI RT. 005 RW. 002 DESA HARAPAN MASA KEC.TAPIN SELATAN KAB.TAPIN KALIMANTAN SELATAN	TW I	Rp 64.000.000
			TW II	Rp 23.000.000
18	PT. PERTAMINA RETAIL '47301	JL. Brigjen H. Hasan Basri	TW I	Rp 20.000.000
			TW II	Rp 60.000.000
19	PT. TAPIN COAL TERMINAL 52221	Jalan A. Yani KM 101 RT 08 RW 03 No. 10, Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan,Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 677.967.712
			TW II	Rp 2.512.221.129
			TW III	Rp 70.194.167
			TW IV	Rp 2.332.736.503
20	PT. BATU GUNUNG MULIA '52104	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 197.753.425
	46610	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW I	Rp 58.757.500
	52104	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW II	Rp 72.224.000
			TW III	Rp 146.318.679
			TW IV	Rp 3.333.649
	49432	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW II	Rp 72.224.000
			TW IV	Rp 3.333.649
	47301	Jl. A. Yani Km. 94 RT.006 RW.003 Kab.Tapin Kalimantan Selatan	TW II	Rp 55.364.000
			TW III	Rp 33.687.000
			TW IV	Rp 156.649.290
21	PT. BINUANG KARYA BERSAMA '09900	JL. NES 15 RT. 011 RW. 004	TW I	Rp 500.000.000
			TW II	Rp 3.000.000.000
			TW III	Rp 500.000.000
			TW IV	Rp 250.000.000
			TW IV	Rp 25.000.000
22	INDOMARCO PRISMATAMA 47111	INDOMARET A YANI KM 83,(TIW9), JALAN HARUBAN RT.005 RW.002 TAPIN	TW II	Rp 105.550.050
				Rp 3.305.000
			TW IV	Rp 59.574.050
			TW IV	Rp 39.648.500
			TW IV	Rp 34.976.241

			TW IV	Rp 27.341.451
			TW IV	Rp 22.437.257
			TW IV	Rp 16.471.437
			TW IV	Rp 6.935.345
			TW IV	Rp 6.693.209
			TW IV	Rp 6.652.285
			TW IV	Rp 2.654.443
23	TRI BUANA MAS '01262	DESA BATALAS, KEC. CANDI LARAS UTARA, KAB. TAPIN, PROV. KALIMANTAN SELATAN	TW II	Rp 654.813.174
			TW III	Rp 5.525.343.100
			TW IV	Rp 4.793.189.850
24	SINAR ALAM ANGKASA MANDIRI '68111	JALAN BRIGADIR JENDRAL HASAB BASRI	TW II	Rp 750.000.000
25	HASNUR CENTRE'85121	JL. HAULING HASNUR KM 12	TW II	Rp 42.485.000
			TW IV	Rp 80.899.000
	85122	JL. HAULING HASNUR KM 12	TW II	Rp 11.005.000
			TW III	Rp 16.982.600
			TW IV	Rp 58.231.300
	85132	JL. HAULING HASNUR KM 12	TW II	Rp 4.720.000
			TW IV	Rp 38.003.700
	85133	JL. HAULING HASNUR KM 12	TW IV	Rp 1.170.000
26	SUMBER ALFARIA TRIJAYA '47111	( SAT HASAN BASRI RANTAU-1GM6) JALAN BRIGJEN H HASAN BASRI RT 03 RW 01 KELURAHAN RANTAU KIWA KEC. TAPIN SELATAN	TW I	Rp 1.590.000
				Rp 1.590.000
			TW II	Rp 5.674.834
				Rp 1.590.000
			TW III	Rp 1.590.000
				Rp 34.883.862
			TW IV	Rp 15.057.218
TW IV	Rp 29.454.483			
27	-		TW II	Rp 1.147.345.000
28	ENERGI BATU BARA LESTARI '05100	DESA SHABAH KAB.TAPIN KALIMANTAN SELATAN	TW III	Rp 19.411.891.776
				Rp 6.263.121.309
				Rp 2.250.000.000
				Rp 1.417.860.463
			TW IV	Rp 339.399.500
29	KHARISMA ALAM PERSADA '01262	Jl. Desa Baringin A Kab. TapinKalimantan Selatan	TW III	Rp 5.868.579.881,00
	10431	Jl. Desa Baringin A Kab. TapinKalimantan Selatan	TW III	Rp 585.995.000
30	REZKY MULIA PELITA '41016	JL. PELITA KAB. TAPIN KALIMANTAN SELATAN	TW III	Rp 1.270.000.000
	42202	JL. PELITA KAB. TAPIN KALIMANTAN SELATAN	TW III	Rp 156.000.000
31	ANUGERAH HARAPAN ALAM '08995	Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar dan Kab. Tapin Kalimantan Selatan	TW III	Rp 500.000.000

32	YATIM LAND INDONESIA '68111	JL. BYPASS RT 01 RW 01 Binderang, Lokpaikat, Tapin Kab. Tapin Kalimantan Selatan	TW III	Rp 100.000.000
33	AGRINA SANGKARA PERSADA 49431	Jl. Desa Baringan A, candi Laras Selatan	TW IV	Rp 30.710.958.545
34	BELAWAIAN ENERGI PRIMA		TW II	Rp 73.000.000
				<b>Rp 1.755.430.217.244</b>

## 2. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan”

Untuk mengukur indikator sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan” maka dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa capaian target indek kepuasan masyarakat DPMPTSP tahun 2024 yaitu sebesar 88,98 poin dengat target yang telah ditetapkan yaitu 87,5 poin dengan persentase capaian realisasi sebesar 101,69%.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan**	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan	87,5	88,98	101,69
<b>Sumber data :</b>					
<b>** : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPTSP Tahun 2024</b>					

Dalam rangka melaksanakan tercapainya Sasaran Strategis kedua “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan”, pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pengguna layanan. Hasil servei ini menjadi masukan bagi DPMPTSP untuk memperbaiki layanan terhadap

masyarakat dan bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Adapun upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yaitu :

1. Pada tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Tapin telah menerapkan MPP Digital untuk pengurusan izin praktik tenaga kesehatan dan tenaga medis.
2. Membuka layanan helpdesk bagi masyarakat pengguna layanan
3. Peningkatan kapasitas petugas pelayanan melalui pelatihan pelayanan prima
4. Dalam proses penerbitan izin yang diperlukan rekomendasi dari dinas teknis, permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis juga dapat terjadi, oleh karena itu dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk berkoordinasi dalam proses penerbitan izin.
5. Melakukan koordinasi dengan tim pengelola system perizinan berusaha OSS RBA pada Kementerian Investasi/BKPM saat terjadi gangguan sistem dan menyampaikan kendala tersebut bagi pelaku usaha di Kabupaten Tapin melalui sosial media dan website DPMPTSP Kabupaten Tapin.
6. Melaksanakan Inovasi Perizinan Jemput Bola  
Pelaksanaan kegiatan Inovasi Perizinan Jemput Bola atau pelayanan perizinan keliling di Kabupaten Tapin Tahun 2024 dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Kegiatan pelayanan perizinan jemput bola tersebut dilaksanakan pada 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin dengan jadwal kegiatan satu Desa untuk satu Kecamatan yang dilaksanakan pelayanan perizinan berusaha melalui aplikasi OSS RBA berupa penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

### 7. Pelayanan Keliling Perizinan Berusaha

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tapin berada di Tengah ibukota Kabupaten Tapin. Kondisi akses jalan dan topografi yang tidak seluruhnya berkategori layak bagi Masyarakat, menjadikan suatu semangat bagi DPMPSTP Kabupaten Tapin untuk mendatangi langsung Masyarakat/pelaku usaha ke wilayah kecamatannya masing-masing.

### 8. Bimbingan teknis bagi pegawai pemerintah desa kelurahan dan kecamatan.

DPMPSTP Kabupaten Tapin melaksanakan Bimbingan Teknis Bagi pegawai pemerintah desa kelurahan dan kecamatan dengan harapan, masyarakat / pelaku usaha bisa lebih cepat berinteraksi dengan layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin khususnya dalam penerbitan perizinan berusaha yang dapat dilakukan secara online. Bimbingan Teknis dilaksanakan di Aula Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tapin. Materi yang disampaikan meliputi tata cara pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Materi disampaikan oleh Narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

## 3. Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Untuk mengukur indikator sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	79,70	103,51

Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPMPSTP



Berdasarkan LHE evaluasi SAKIP DPMPTSP hasil menunjukkan bahwa nilai SAKIP DPMPTSP 79,7 atau predikat BB. Rincian penilaian SAKIP DPMPTSP jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 terdapat peningkatan nilai, dengan rincian sebagai berikut :

<b>KOMPONEN</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<i>A. Perencanaan Kinerja</i>	23,70	23,70
<i>B. Pengukuran Kinerja</i>	23,70	24,00
<i>C. Pelaporan Kinerja</i>	12	12,00
<i>D. Evaluasi Internal</i>	16,75	20
	76,15	79,70

Berdasarkan evaluasi menunjukkan peningkatan dalam implementasi SAKIP DPMPTSP. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan komitmen dari Kepala Daerah, Tim SAKIP Kabupaten Tapin, Tim SAKIP DPMPTSP dan seluruh pegawai baik PNS maupun Non PNS pada DPMPTSP Kabupaten Tapin. Tersedianya dasar hukum atas evaluasi SAKIP yaitu Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya peningkatan implementasi SAKIP yaitu perbaikan dalam dokumen perencanaan yaitu meningkatkan target dalam perjanjian kinerja, peningkatan evaluasi internal melalui monev capaian kinerja triwulan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran dan evaluasi kinerja.

#### **4. Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah”**

Capaian kinerja atas Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) tahun 2023 sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	76,11	117,09%
<b>Sumber data :</b>					
<b>** : IP ASN Aplikasi Padaringan</b>					

Pada sasaran Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah tahun 2024 nilai yang dicapai sebesar 76,11. Dalam mencapai kinerja ini terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya pengembangan kompetensi baik teknis maupun non teknis dalam bentuk diklat. PNS yang menduduki jabatan Fungsional baik di Bidang maupun pada Sekretariat belum seluruhnya mengikuti diklat yang menunjang kompetensi jabatan. Contohnya pada sekretariat belum ada diklat atau pelatihan yang menunjang untuk keuangan dan perencanaan. Selain itu sebagian besar PNS pada DPMPSTSP belum mengikuti Diklat PIM.

### 3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya 2023 atau tahun n-2 2022 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja**

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	INDIKATOR	Perbandingan Realisasi Kinerja								
		2022			2023			2024		
		Target	Target	Target	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Meningkatnya Nilai Investasi Daerah</b>	Nilai Investasi PMA dan PMDN*	525	1012,15	192,79%	541	1.464,88	270,77	Rp 1.530 Milyar	Rp 1.829,26 Milyar	119,56%
	Persentase Peningkatan Investasi Daerah*	3%	11,91%	396,98%	5%	44,73%	894,60%	5%	24,87%	497,40%
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan</b>	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan**	85	86,68	101,98%	87	87,14	100,16	87,5	88,98	101,69%
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-	-	-	76	76,15	100,19	77	79,70	103,51%
<b>Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah</b>	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah****	-	-	-	65	35,7	54,92	65	76,11	117,09%

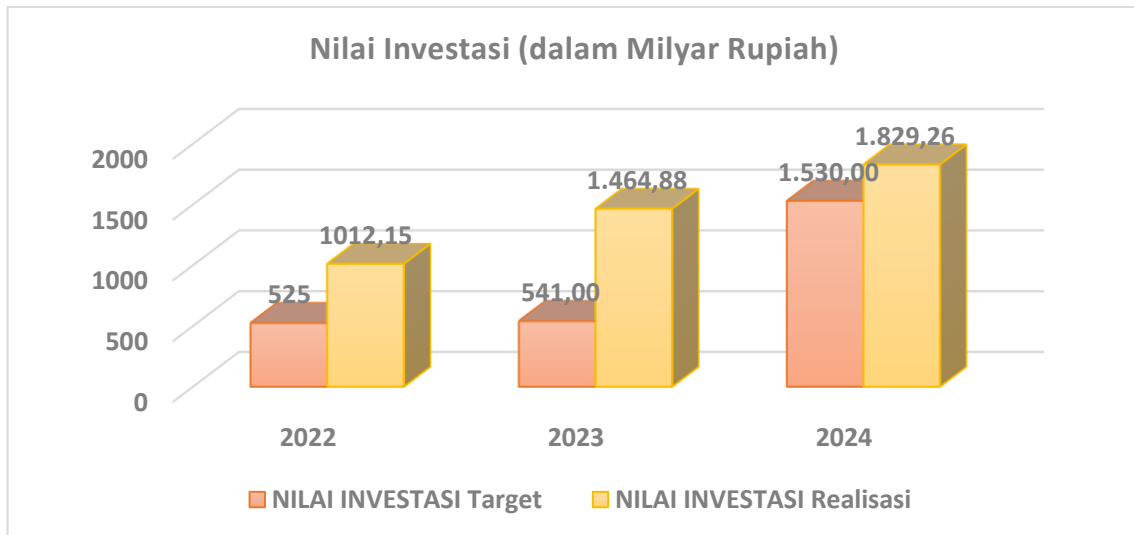
Sumber data : DPMPTSP data diolah  
 \*: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2021 2022 2023 dan 2024  
 \*\*: Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPTSP Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024  
 \*\*\* : LHE Sakip DPMPTSP  
 \*\*\*\* : Rekap IP ASN

## Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

### 1. Meningkatnya Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

#### Persentase peningkatan investasi daerah

##### (1) Nilai Investasi PMA dan PMDN\*



Tahun	Target	Realisasi	%Capaian
2022	525	1.012,15	192,79%
2023	541	1.464,88	270,77%
2024	1530	1,829,26	119,56%

Pada grafik diatas menunjukkan perbandingan capaian indikator pertama “Nilai Investasi” tahun 2022, 2023 dan 2024. Pada data diatas dapat dilihat bahwa Nilai Investasi meningkat dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 realisasi investasi sebesar Rp1.012,15 Milyar, pada tahun 2023 sebesar Rp1464,88 Milyar, dan tahun 2024 sebesar Rp1829,26. Perbandingan realisasi Nilai Investasi pada beberapa tahun sebelumnya menunjukkan trend yang meningkat dari tahun sebelumnya, dan target yang ditentukan telah tercapai.

## (2) Persentase Peningkatan Investasi Daerah



Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	3%	11,91%	396,98%
2023	5%	44,73%	894,60%
2024	5%	24,87%	497,40%

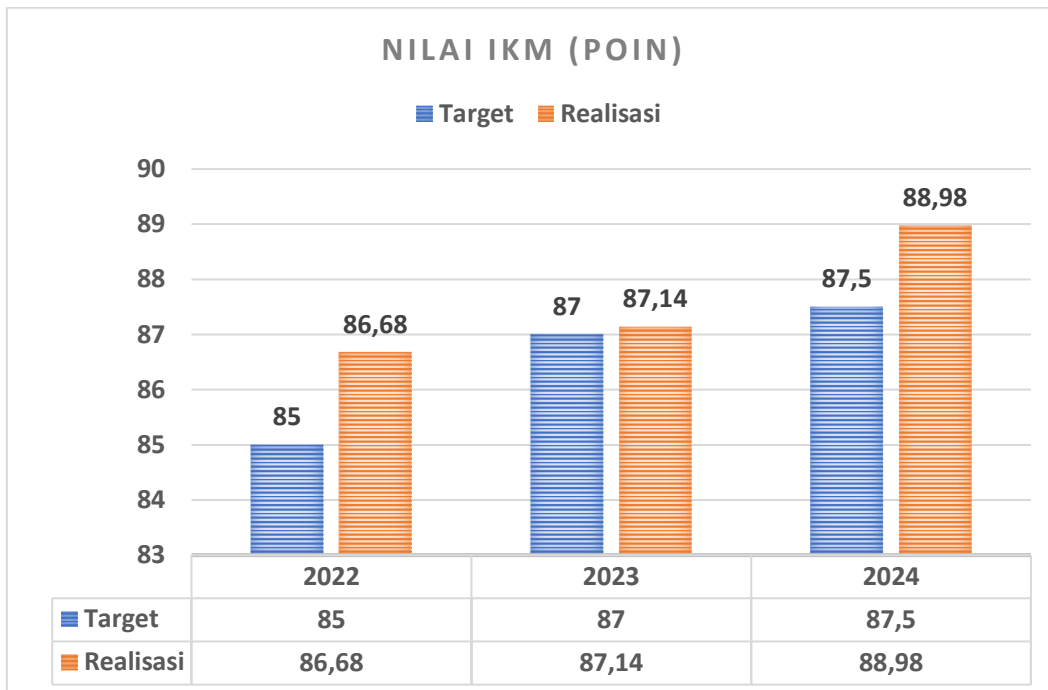
Pada grafik diatas menunjukkan perbandingan capaian indikator kedua “Persentase Peningkatan Investasi Daerah ” tahun 2022, 2023 dan 2024. Pada data diatas dapat dilihat bahwa Persentase Peningkatan Investasi Daerah dari tahun sebelumnya menunjukkan angka yang fluktuatif, namun trend pertumbuhan investasi di Kabupaten Tapin selama tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan investasi yang positif.

## 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan

**Indikator : Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan**

Pada grafik dibawah menunjukkan perbandingan nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Pada data diatas dapat dilihat bahwa capaian nilai Survei Kepuasan

Masyarakat pada DPMPTSP meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2023 87,14 poin dan pada tahun 2024 yaitu 88,98 poin.



Perbandingan nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada beberapa tahun sebelumnya menunjukkan trend yang terus meningkat. hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya capaian nilai SKM dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2024 predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam “Kinerja Sangat Baik”, berdasarkan dalam skala pengukuran ordinal Permenpan RB No. 14 Tahun 2017.

Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
<b>1,00 – 2,5996</b>	25,00 – 64,99	D	<b>Tidak Baik</b>
<b>2,60 – 3,064</b>	65,00 – 76,60	C	<b>Kurang Baik</b>
<b>3,0644 – 3,532</b>	76,61 – 88,30	B	<b>Baik</b>
<b>3,5324 – 4,00</b>	<b>88,31- 100,00</b>	<b>A</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber : Permenpan RB No. 14 Tahun 2017

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja DPMPTS Kabupaten Tapin dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan tercapai dengan kategori Baik. Peningkatan kualitas pelayanan akan terus menjadi fokus DPMPTSP dalam melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik. Hasil dari kinerja ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak serta anggaran yang memadai untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik.

### 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

<i>Indikator</i>		<b>2023</b>	<b>2024</b>
<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Target	76	77
	Realisasi	76,15	79,70
	% Capaian	100,20	103,51%

Tahun 2024 sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai hasil yang baik dengan nilai sebesar 79,70 dengan kategori BB. Nilai ini berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DMPTSP oleh Inspektorat Kabupaten Tapain. Tercapainya kinerja ini tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dilingkungan DPMPTSP Kabupaten Tapin serta dukungan dari Kepala Daerah dan Tim SAKIP Kabupaten Tapin. Berbagai upaya yang dilakukan dalam perbaikan SAKIP pada DPMPTSP telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan.

### 4. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

<i>Indikator</i>		<b>2023</b>	<b>2024</b>
<i>Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah</i>	Target	65	65
	Realisasi	35,7	76,11
	Capaian	54,92%	117,09%

Realisasi Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah dengan nilai 76,11. Nilai IP ASN DPMPTSP terjadi peningkatan dari

tahun sebelumnya. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN. Komponen nya kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN. Terlaksananya pelatihan dan diklat bagi pegawai DPMPTSP meningkatkan IP ASN dilingkungan DPMPTSP.

### 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun n dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2022-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5* 100
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp 1.829,26 Milyar	Rp 1.680 Milyar	108,88%
		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	24,87%	5%	497,4%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan	88,98	89	99,97
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,70	81	98,39
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	76,11	70	108,72

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kab. Tapin



Capaian kinerja Nilai Investasi PMA dan PMDN berdasarkan target renstra ditahun 2026 sebesar Rp1.680 milyar dan relaisasi tahun 2024 sebesar Rp1829,26 Milyar. Realisasi di Tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditentukan dalam renstra maupun perjanjian kinerja. Persentase capaian atau tingkat kemajuan sebsesar 108,88%. Sedangkan capaian Persentase Peningkatan Investasi Daerah pada tahun 2024 yaitu 24,87%. Realisasi indikator kinerja Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan tahun 2024 yaitu 88,98 dibandingkan dengan target diakhir tahun renstra yaitu 89 telah tercapai 99,97%., capaian kinerja ini telah mencapai dari yang telah ditargetkan pada target jangka menengah. Indikator selanjutnya yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan realisasi 79,70 pada tahun 2024, dengan persentase tingkat kemajuan 98,39%. Indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah dengan realisasi 76,11 dengan persentase tingkat kemajuan 108,72%.

### 3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kab. Tapin	Kinerja Kab. Tapin	Provinsi Kalsel		Nasional		% kinerja Kab. Tapin dibanding Kinerja Provinsi	% kinerja Kab. Tapin dibanding Kinerja Nasional
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Rp 1.530 Milyar	Rp 1.829,26 Milyar	Rp.19 Triliun	Rp18,13 Triliun	Ro 1.650 Triliun	Rp.1.714 Triliun	10%	0,11%
	Persentase Peningkatan Investasi Daerah*	5%	24,87%	16.210	19.762,24	1.400.000	1.418.900		
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : DPMPTSP Kab. Tapin data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi yang masuk di Kabupaten Tapin Tahun 2024 sebesar Rp1.829,26 Milyar. Jika dibandingkan dengan total investasi secara nasional sebesar Rp1714 Triliun atau sebesar 0,11% dari total investasi seluruhnya yang masuk ke Indonesia dan realisasi investasi di Provinsi Kalsel yaitu Rp18,13 Triliun. Perbandingan realisasi Kab. Tapin dengan Provinsi Kalsel yaitu 10%.

### 3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp 1.530 Milyar	Rp 1.829,26 Milyar	119,56%	DPMPTSP Kabupaten Tapin berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan upaya DPMPTSP dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kepada pelaku usaha di Kabupaten Tapin untuk memenuhi kewajiban pelaporan LKPM menunjukkan hasil yang baik.	1. Pengawasan dan Pemantauan Pelaku usaha 2. Pembinaan yaitu Bimbingan Teknis tentang tata cara pelaku usaha melaporkankan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 3. Memberikan himbauan kepada Pelaku Usaha untuk melaporkan LKPM
		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	5%	24,87%	497,40%		
2	Meningkatnya Kualitas	Indeks kepuasan	87,5	88,98	101,69%	DPMPTSP Kabupaten Tapin berhasil mencapai target	1. Peningkatan Pelayanan perizinan berbasis

	Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan	Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan				yang ditetapkan. Hasil pencapaian ini menunjukkan upaya-upaya DPMPTSP Kabupaten Tapin dalam memberikan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan.	elektronik salahsatunya MPP Digital 2. Membuka layanan helpdesk bagi masyarakat pengguna layanan 3. Peningkatan kapasitas petugas pelayanan melalui pelatihan pelayanan prima 4. Koordinasi pelaksanaan perizinan di daerah terkait regulai yang update 5. Melaksanakan Inovasi Perizinan Jemput Bola
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	79,70	103,51%	DPMPTSP Kabupaten Tapin berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan komitmen dari Kepala Daerah, Tim SAKIP Kabupaten Tapin, Tim SAKIP DPMPTSP dan seluruh pegawai baik PNS maupun	1. Meningkatkan evaluasi kinerja internal 2. Melaksanakan sosialisasi SAKIP dilingkungan DPMPTSP

						Non PNS pada DPMPTSP Kabupaten Tapin.	
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	76,11	117,09%	DPMPTSP Kabupaten Tapin berhasil mencapai target yang ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas ASN dengan mengikuti Diklat dan Pelatihan.</li> <li>2. Memberikan himbauan kepada ASN untuk melakukan updating riwayat Diklat/ Kursus</li> </ol>

Sumber : DPMPTSP Kab. Tapin

### 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.7 Pxebandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

NO	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-8
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp 1.530 Milyar	Rp 1.829,26 Milyar	119,56%	Rp1.262.132.850	Rp1.026.316.450	81,32	38,24
		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	5%	24,87%	497,40				
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan	87,5	88,98	101,69	Rp652.382.090	Rp546.270.600	83,73%	17,96
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	79,70	103,51	Rp6.048.619.965	Rp5.624.803.469	92,99%	10,52
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	76,11	117,09				

Sumber : DPMPSTSP Kab. Tapin

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

### **1) Sumber Daya Manusia (SDM)**

Ketersediaan sumber daya manusia pada DPMPTS masih kurang namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTS telah memaksimalkan keterbatasan tersebut, sehingga kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat/ pelaku usaha Petugas pelayanan perizinan dibantu tenaga kontrak untuk memaksimalkan SDM di DPMPTSP.

Selain itu penggunaan sistem OSS juga membantu bagi masyarakat untuk mengurus izin secara online. Mekanisme pengaduan terhadap pelayanan juga dapat diakses diberbagai media baik secara langsung maupun online seperti aplikasi Laporan dan social media facebook.

### **2) Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam telah cukup memadai untuk melaksanakan masing-masing program dan kegiatan dalam urusan Pelayanan Publik, dengan beroperasionalnya MPP maka DPMPTSP dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin harus tetap melakukan peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga tidak menghambat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### **3) Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu anggaran untuk program dan kegiatan baik yang menunjang sekretariat dan bidang yaitu

sebesar Rp7.963.134.905 dengan realisasi sebesar Rp7.197.390.519,00 dengan rata-rata realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tahun adalah sebesar 90,38%.

Kinerja Utama “Meningkatnya Nilai Investasi Daerah” dengan indikator Nilai Investasi PMA dan PMDN dan Persentase Peningkatan Investasi telah mencapai target yang ditetapkan. Tingkat capaian realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN yaitu sebesar 119,56% dan Persentase Peningkatan Investasi Daerah 497,40%, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja telah mencapai target yang ditentukan sehingga DPMPTSP telah efisien dalam penggunaan anggaran.

Selanjutnya pencapaian Kinerja Utama “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan” dengan indikator Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan. Realisasi kinerja sebesar 88,98 poin. Persentase capaian kinerja yaitu 101,69%, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja telah mencapai target yang ditentukan sehingga DPMPTSP telah efisien dalam penggunaan anggaran.

Pada tabel 3.17 terlihat perbandingan antara realisasi keuangan dan capaian kinerja DPMPTSP serta tingkat efisiensi. Secara umum dapat dilihat bahwa capaian kinerja DPMPTSP telah mencapai target yang diharapkan, sehingga DPMPTSP telah efisien dalam penggunaan sumber daya keuangan dalam menunjang pencapaian kinerja.



**3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA dan PMDN	119,56%	1. Program Pengendalian Pelaksanaan	1. Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Kebijakan	100%	Menunjang	Menunjang dalam melaksanakan pengendalian penanaman modal di Kabupaten Tapin. Melalui program ini DMPTSP Kabupaten Tapin melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Tapin untuk memenuhi kewajibannya.
		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	497,40%	Penanaman Modal	2. Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disetujui	100%	Menunjang	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan	101,69%	2. Program Pelayanan	1. Persentase penerbitan perizinan yang berbasis	103	Menunjang	Menunjang dalam melaksanakan pelayanan publik. Melaksanakan

Perizinan maupun Non Perizinan	maupun Non Perizinan		Penanaman Modal	elektronik sesuai ketentuan	100		pelayanan perizinan dan non perizinan, memperluas informasi terkait perizinan melalui sosialisasi. Melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengukut kulaitas pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPPTSP Kab. Tapin
				2. Persentase SDM teknis dan non teknis yang kompeten	100		
				3. Persentase sinkronisasi perizinan daerah	100		
				4. Persentase Penyebaran Informasi Pelayanan Publik yang dipenuhi	100		
				5. Persentase realisasi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100		
				6. Persentase data pengaduan tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	103,51%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	99,16	Menunjang	Menunjang dalam meningkatkan kapasitas ASN DPMPPTSP Tapin. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan rutin.
				2. Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	100,42		
Meningkatnya Profesionalisme	Indeks Profesionalisme	118,46%		3. Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	97,96		

	ASN Perangkat Daerah	ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah			4. Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	117,99		Menindaklanjuti rekomendasi terkait perencanaan dari Bappelitbang dan rekomendasi perbaikan SAKIP dari Inspektorat.
					5. Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100,00		
					6. Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100,00		
					7. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	97,76		

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2024 hasil indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara telah memenuhi target yang ditetapkan. Berbagai pencapaian target indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran hasil dari komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen DPMPTSP Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

### **1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

*Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal **mendukung Sasaran Strategis DPMPTSP yaitu “Meningkatnya peran investasi daerah dalam pembangunan perekonomian”***

Program ini melaksanakan kegiatan berupa Pengawasan dan Pembinaan. Sasaran pelaksanaan program kegiatan ini yaitu pelaku usaha di Kabupaten Tapin. Secara garis besar hasil dari pelaksanaan program ini mendukung dari terealisasinya nilai investasi. Program ini melaksanakan kegiatan yaitu Pengawasan terhadap pelaku usaha yang sudah memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM namun masih terdapat kendala baik pengisian yang belum benar maupun penyampaian LKPM yang tidak tepat waktu. Hasil kegiatan ini dapat meningkatkan ketaatan pelaku usaha menyampaikan LKPM.

Pembinaan dalam bentuk sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pelaku usaha dalam menggunakan sistem untuk pelaporan LKPM. Melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini maka para pelaku usaha/ perusahaan dapat meningkatkan pemahaman, kemampuan dan ketaatan pelaku usaha/ perusahaan di Kabupaten Tapin untuk melaporkan Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) sehingga mendukung tercapainya target investasi di Kabupaten Tapin

**Adapun penjelasan dari pelaksanaan kegiatan yaitu :**

### ***1. Pengawasan Penanaman Modal***

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal merupakan Upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal. Tujuan dilaksanakan Pengawasan untuk memastikan lokasi dan kewajiban untuk pelaporan kegiatan Penanaman Modal Perusahaan yang sedang berjalan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pengawasan juga bisa dapat dilakukan atas dasar adanya indikasi pelanggaran Penanaman Modal, dan atau adanya laporan masyarakat.

Pada kegiatan pengawasan menargetkan pada pelaku usaha yang sebelumnya telah menyampaikan LKPM namun terdapat kendala seperti ketidaktepatan dalam pengisian LKPM. Pada kondisi lapangan ditemukan bahwa masalah terkait Realisasi yang dilaporkan oleh pelaku usaha selalu 0 (nol) rupiah. Melalui kegiatan ini maka kami dapat memberikan arahan bahwa perusahaan harusnya mengisi LKPM dengan modal kerja dan modal tetap yang ada diperusahaan. Sehingga manfaat dari kegiatan Pengawasan adalah untuk peningkatan kesadaran dalam Pelaporan Kegiatan Penanaman Modalnya dan melengkapi pengurusan Izin Usaha Penanaman Modal dan juga mempunyai legalitas bangunan usaha.

Pelaksanaan Pengawasan didampingi oleh Tim Teknis Organisasi Perangkat Daerah terkait, dan untuk Perusahaan yang dikunjungi berdasarkan system Aplikasi OSS, yang diverifikasi oleh Pelaku Usaha dan Tim Teknis Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Hasil dari kegiatan ini memberikan manfaat meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM yang bertambah di setiap Triwulannya, sehingga data realisasi

investasi di Kabupaten Tapin dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun daftar pelaku usaha/ perusahaan yang dilakukang pengawasan penanaman modal :

### **Daftar Pengawasan Tahun 2024**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NIB	ALAMAT	TGL PELAKASANAAN
1	PT. Plantindo Agro Subur	9120204131718	Ds. Teluk Haur, Kec. Candi Laras Utara	13 Februari 2024
2	PO. Putri Sabrina Budi	0509230139621	Jl. Jend. A. Yani 10/3, Kec. Tapin Utara	16 Februari 2024
3	PO. Multi Sukses Binuang	0606230034449	Dl. Pelda Munawar NO. 61, RT. 04 RW. 01, Ds. Pualam Sari, Kec. Binuang	19 Februari 2024
4	PT. Berkah Lancar Mandiri	9120012172158	Jl. Jend. A. Yani KM. 108 001/001, Kec. Bungur	20 Februari 2024
5	PT. Fafage Vamos Banua	1811220105749	Jl. Blok M NO. 92 002/001, Kec. Binuang	21 Februari 2024
6	CV. Geya Bersaudara	0220003811756	Jl. Raya Timur Blok L No. 51 001/001, Kec. Binuang	22 Februari 2024
7	CV. Teddy Anugrah Utama	1608230075441	Jl. Rangda No.18, Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara	26 Februari 2024
8	CV. Nomta Digitech	0909220002618	Perum. Adi Jaya Dua Blok J No. 6, Kec. Bungur	27 Februari 2024
9	Apotek Medika Farma	1104220027859	Jl. Brigjend H. Hasan Baseri, RT 005/001, Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara	28 Februari 2024
10	Ahmad Amanan	1210230059268	Jl. A. Yani KM. 88, Karang Putih, Kec. Binuang	29 Februari 2024
11	PT. BALIMAS AGROPERDANA	1210230059268	Ds. Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin	22 Juli 2024
12	PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL	8120311031254	Jl. Hauling Batubara Hasnur Group KM. 1	22 Juli 2024
13	PT. UNITED TRACTORS	8120009960872	Jl. A. Yani KM. 89, RT 004/RW002	23 Juli 2024
14	PT. KALIMANTAN	8120109922555	Jl. A. Yani KM. 111	25 Juli 2024

	PRIMA PERSADA			
15	PT. ANUGERAH BINUANG MULIA	0220106790511	Jl. A. Yani KM. 94, RT 006/RW 003	25 Juli 2024
16	PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL	8120311031254	Jl. Hauling Batubara Hasnur Group KM. 1	29 Juli 2024
17	PT. HARAPAN BINUANG MUDA	220007441851	Jl. Lambung Mangkurat Blok L RT. 001	30 Juli 2024
18	PT. BALIMAS AGROPERDANA	1502230087286	Ds. Kalumpang, Kec. Bungur, Kab. Tapin	31 Juli 2024
19	AHMAD FARHAN	2408210009894	Jl. A. Yani KM. 94 RT 006/RW 003	28 Agustus 2024
20	PT. ALADDIN BERKAH CAHAYA	1101230017325	Jl. Hauling Hasnur KM. 30	2 September 2024
21	CV. BERDIKARI NUSANTARA	1299000520751	Jl. Pembangunan No. 10, RT 004/ RW 001	3 September 2024
22	PT. TAWAKAL INSAN NUSANTARA	2307240091646	Jl. Jend. Sudirman KM. 111 Bypass Komp. Griya Rantau Asri Rantau No. 1, RT 009/RW 003	4 September 2024
23	TEGUH AGUNG SAMUDRA, SP	1905220010581	Jl. Bypass Trantang, RT 013/RW 004	22 Oktober 2024
24	PT. MARATA CIPTA SARANA	0220004392864	Jl. Jend. Sudirman Komp. Griya Asri 1 No. 20, RT 009/ RW 003	23 Oktober 2024
25	PT. DHEJA MULIA ESTATE	1212230139484	Jl. A. Yani Kupang Belangamas	24 Oktober 2024
26	CV. ALEA JAYA PERKASA	1507220033753	Perumahan Griya Lokpaikat Asri Blok 1, No. 02	25 Oktober 2024
27	PT. GUNUNG DILAM	9120204402225	Jl. Brigjend H. Hasan Basry, RT 002/RW 01, Ds. Parandakan, Kec. Lokpaikat	28 Oktober 2024
28	PT. FARHAN AFIFA BERSAUDARA	0220105590585	Jl. Sarang Burung No. 227, RT007/RW 003, Ds. Tungkap	29 Oktober 2024

29	CV. ANTASARI ESTETIKA	0101220001503	Jl. Hakim Samad	4 November 2024
30	PT. KULA ADY JAYA	1809230091225	Jl. Salingsing, RT 009/RW002	5 November 2024
31	CV. AL HARIRI	2706240061953	Kec. Tapin Utara	6 November 2024
32	CV. ANUGERAH YUSUF DIGDAYA	2110210040061	Jl. Penghulu No. 43	7 November 2024
33	CV. BUANA PRIMA MANDIRI	0220001663105	Jl. Pelita No.34	8 November 2024
34	CV. LUMBU RAYA MANDIRI	0220207221498	Jl. Perintis Raya, Ds. Lumbu Raya, RT 002/RW 001	11 November 2024
35	MADIYATI	2611210008918	Jl. A. Yani KM. 101	12 November 2024
36	ROBBY APRIANDIE	0410210012094	Jl. Aroba No. 49, Kel. Rangda Malingkung	18 November 2024
37	CV. SAHABAT SARANA TEKNIK MANDIRI	0220007131755	Jl. Lembaga Budi No. 34, Kel. Rantau Kanan	19 November 2024
38	CV. TAPIN RASA	1612220064743	Jl. A. Yani KM. 102, Kel. Suato Tatakan	25 November 2024
39	CV. RIDHA UTAMA	0259010102388	Jl. Jend. A. Yani, RT 017/RW 004, Kel. Kupang	26 November 2024
40	CV. JAYA BANUA KONSTRUKSI	2003220011577	Kopm. ASABRI Citra Kartika Eka Paksi Blok F, Kel. Rangda Malingkung	28 November 2024
41	CV. Mandiri Steel Group	2903220046826	Jl. Bir Ali No. 39, RT002/RW 001, Kel. Rantau Kanan	29 November 2024
42	CV. Sinar Dodo	2908230068888	Jl. Jend. H. Hasan Basry KM. 01, No. 10, Kel. Rantau Kiwa	02 Desember 2024





Gambar 3.1 Kegiatan Pengawasan ke Pelaku Usaha

## **2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha**

Kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam memahami tata cara Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pemahaman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di aplikasi OSS. Pada praktik dilapangan tidak sepenuhnya Pelaku Usaha (Perusahaan) memahami dan mengetahui terkait penyampaian LKPM, bahkan tidak menyadari tentang tanggung jawab dalam penyampaian LKPM. Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi Pelaku Usaha dilakukan untuk memenuhi kegiatan Pembinaan. Pada saat kegiatan berlangsung, hambatan yang di hadapi saat pelaksanaan kegiatan adalah penyesuain jadwal bimtek yang mengikuti dengan jadwal narasumber dan beberapa pelaku usaha yang diundang tidak hadir saat pelaksanaan kegiatan.

Adapun upaya agar pelaku usaha hadir dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu menekankan kepada Pelaku Usaha untuk hadir dalam kegiatan BIMTEK, karena bisa saja pada saat kegiatan berlangsung para pelaku usaha dapat memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada narasumber apabila pada saat penyampaian di temukan kendala atau permasalahan yang berkaitan dengan penyampaian LKPM. Upaya lain

yang dilakukan yaitu memberikan konsultasi secara langsung bagi pelaku usaha yang ingin berkonsultasi dapat datang ke kantor DPMPTSP.

Hasil yang di dapat dari kegiatan adalah selain meningkatnya pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha dilihat dari penyampaian LKPM yang bertambah di setiap Triwulannya ada juga kendala atau masalah yang ditemukan, sehingga bisa menjadi ilmu baru bagi pelaku usaha yang lain.



Gambar 3.2 Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian LKPM

## 2. Program Promosi Penanaman Modal

### Kegiatan Promosi Penanaman Modal

#### 1. Promosi - Pameran Nasional Indonesia Tourism & Trade Investment Expo (Ittie) 2024 Yogyakarta

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan beserta DPMPTSP Kabupaten Tapin, DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Tengah, DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Utara, DPMPTSP Kabupaten Tabalong dan DPMPTSP Kabupaten Batola sebagai ujung tombak investasi di Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pameran

Nasional Indonesia Tourism & Trade Investment Expo (ITTIE) 2024 Yogyakarta dari tanggal 25 – 28 April 2024.

Peserta yang mengikuti pameran tersebut berasal dari Instansi Pemerintah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) dan Para Pelaku Usaha dan UMKM. Pameran Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2024 (ITTIE) 2024 Yogyakarta dibuka oleh Biro Administrasi dan Perekonomian SDA Sekretariat Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta Ibu Yuna Pancawati, SE, M.SE dan General Manager PT. Furindo Artha Mas Bapak Mulyanto.

Kegiatan ini menekankan pada peningkatan hasil devisa dan ekspor produk-produk unggulan serta mendorong investasi dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pameran ini dimaksudkan untuk memberikan semangat dan pendorong dalam berkarya dan berkreasi bagi para pelaku usaha dan UMKM dengan harapan dapat meningkatkan pemasaran dan memperluas jaringan usaha. Semoga pameran ini dapat menjadi sarana mempromosikan produk unggulan daerah masing-masing sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

## 2. Pameran Nasional Gebyar Wisata & Produk Unggulan Daerah, Indotani Expo, Dan Pekan Promosi Investasi 2024 Bandung

Promosi Investasi/ Pameran Nasional Gebyar Wisata & Produk Unggulan Daerah, Indotani Expo, dan Pekan Promosi Investasi 2024 Bandung dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 25 Agustus 2024. Peserta yang mengikuti pameran tersebut berasal dari Instansi Pemerintah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) dan Para Pelaku Usaha dan UMKM. Produk-produk unggulan Kabupaten Tapin mengisi stand DPMPTSP Kabupaten Tapin. DPMPTSP Kabupaten Tapin membawa produk unggulan dari UMKM KUB Timbaan (sasirangan Timbaan khas Kabupaten Tapin), UMKM olahan Rimpi Binuang, KUB Karya Baru (produk sambal hiyung, abon hiyung, cabe hiyung segar, uyah acan), Gamba (produk-produk olahan unggulan Kabupaten Tapin), SMY Collection (tas, dompet kerajinan purun kombinasi).

Kegiatan Pameran ini dilaksanakan untuk memamerkan potensi investasi, pariwisata dan perdagangan untuk publikasi dan diperkenalkan serta dipromosikan kepada calon investor maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam mendorong masuknya investasi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Dilaksanakannya kegiatan Pameran Gebyar Wisata & Produk Unggulan Daerah, Indotani Expo, dan Pekan Promosi Investasi Daerah 2024 Bandung ini dengan harapan seluruh instansi baik dari Provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta para pelaku usaha dan UMKM dapat berperan serta berpartisipasi dalam pameran tersebut guna mendorong kemitraan usaha, promosi serta mengembangkan pangsa pasar yang lebih luas.



Gambar 3.3 Kegiatan Promosi

### 3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

#### 1. Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin

#### ***Melaksanakan FGD penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin***

Data hasil FGD dapat dijadikan bahan yang up date dalam penyusunan Kajian Potensi, Peta Peluang Investasi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK). Selain FGD juga dilaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait mengenai data potensi dan peluang investasi. Diperlukan koordinasi lintas sektor dan kesepakatan dari pemangku kepentingan di daerah mengenai potensi yang dijadikan unggulan untuk ditawarkan kepada investor.

Data identifikasi potensi unggulan tersebut dipergunakan lebih lanjut sebagai bahan Promosi Penanaman Modal guna menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tapin yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai realisasi investasi Kabupaten Tapin. Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Adapun tujuan dilaksanakannya Focus Group Discussion Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2024 antara lain :

- a. Menyajikan rancangan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2024.
- b. Menganalisis data rancangan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2024.
- c. Menerima masukan dan saran dari stakeholder baik dari investor, SKPD, UMKM serta masyarakat.
- d. Menjaring data potensi dan peluang investasi unggulan Kabupaten Tapin.

Hasil dari kegiatan ini yaitu diperoleh data serta saran dan masukan dari peserta rapat terkait identifikasi Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2024. Rancangan Penelitian yang disajikan pada FGD menghasilkan kajian yang memuat Studi Kelayakan Usaha yang terdiri dari 7 Aspek antara lain Aspek Hukum, Aspek Administrasi dan Kelembagaan, Aspek Teknis, Apek Pasar, Aspek Financial (Nilai Investasi, IRR, PP, NPV), dan Aspek Sosial dan Lingkungan.



Gambar 3.4 FGD Kajian Peta Potensi

Data hasil FGD dapat dijadikan bahan yang up date dalam penyusunan Kajian Potensi, Peta Peluang Investasi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK). Selain FGD juga dilaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait mengenai data potensi dan peluang investasi. Diperlukan koordinasi lintas sektor dan kesepakatan dari pemangku kepentingan di daerah mengenai potensi yang dijadikan unggulan untuk ditawarkan kepada investor.

### ***Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapin***

Pelaksanaan Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten (Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2024) bertujuan antara lain :

- a. Menghasilkan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Di Kabupaten Tapin Tahun 2024 memuat Studi Kelayakan Usaha yang terdiri dari beberapa Aspek antara lain Aspek Hukum, Aspek

- Administrasi dan Kelembagaan, Aspek Teknis, Aspek Pasar, Aspek Sosial dan Lingkungan dan Aspek Financial (Return Of Investment/ ROI, Payback Period (PP), Net Present Value/ NPV).
- b. Hasil Kajian ini menjadikan potensi investasi menjadi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada para investor dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
  - c. Menyajikan Peta Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin.

Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten (Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2024) dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender atau 3 (tiga) bulan dari bulan Juli sampai dengan September 2024. Narasumber Pembuatan Peta Potensi Investasi (Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) orang Tim Tenaga Ahli antara lain: Tenaga Ahli Pengembangan Wilayah, Tenaga Ahli Perikanan, Tenaga Ahli Prasarana Infrastruktur, Tenaga Ahli Pemetaan, Tenaga Ahli Lingkungan, Tenaga Ahli Pertanian, Tenaga Ahli Hukum dan Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan.

Hasil dari Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Di Kabupaten Tapin Tahun 2024 adalah berupa dokumen yang berisi konsep studi kelayakan investasi potensi dan peluang investasi unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang memuat Peta Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin. Keluaran dari kegiatan ini, yaitu :

- 1) 1 (satu) dokumen laporan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Di Kabupaten Tapin Tahun 2024.
- 2) Video Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin.
- 3) Peta Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Di Kabupaten Tapin yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Di Kabupaten Tapin Tahun 2024.

Pada kajian ini data yang digunakan dalam melakukan penggambaran lokasi lahan perkebunan dan pertanian menggunakan beberapa data antara lain :

- Making dan tracking gps lapangan
- Data hasil wawancara dan observasi
- Citra satellite google earth tahun 2023
- SHP RTW Kabupaten Tapin

Sektor unggulan yang dipilih dalam kajian ini berupa sektor bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor unggulan pada komoditas masing-masing kemudian dipilih untuk menjadi komoditas unggulan untuk kelayakan investasi daerah kabupaten Tapin. Adapun beberapa pertimbangan dalam penentuan komoditas unggulan dalam investasi, antara lain;

1. Nilai LQ tertinggi pada komoditas masing-masing
2. Kebijakan daerah
3. Kajian-kajian terkait ekonomi kabupaten Tapin
4. Pola perkembangan dan potensi jangka panjang
5. Daya saing dalam skala lokal, nasional maupun internasional

Dari pertimbangan tersebut, maka disepakati sector unggulan yang menjadi unggulan utama dalam kajian ini yang kemudian masuk kedalam tahap perhitungan peluang investasi yaitu komoditas Hortikultura berupa Cabe rawit hiyung, Biofarmika berupa Jahe dan Perkebunan berupa kopi.

## 2. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

### **Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi kemitraan UMKM denan Perusahaan**

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu antara lain :



- Mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri.
- Mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri.
- Menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.

Adapun manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk mempertemukan/ memfasilitasi perusahaan PMA/ PMDN dengan UMKM dalam bentuk kerjasama kemitraan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak sehingga masyarakat setempat juga merasakan manfaat dari investasi di suatu daerah. Kegiatan ini juga dalam rangka mendorong dan mendukung pelaku usaha untuk melakukan penanaman modal serta meningkatkan penyebaran investasi, meningkatkan kompetensi dan level usaha.

1.	Lima Putera	PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua	2024
2.	Lima Putera	PT. Antang Gunung Meratus	2024
3.	Lima Putera	PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua	2024
4.	KUB Timbaan	PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua	2024

#### 4. Program Pelayanan Penanaman Modal

*Program Pelayanan Penanaman Modal mendukung Sasaran Strategis DPMPTSP yaitu “Meningkatnya Pelayanan Perizinan Maupun Non Perizinan”*

Program ini mendukung terlaksananya tugas dan wewenang DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta pengelolaan pengaduan dari masyarakat. Dengan pelaksanaan program ini telah mendukung meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu :

##### Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik dilaksanakan di loket DPMPTSP 05 dan 06 layanan OSS pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tapin. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Perizinan Berusaha dikelompokkan berdasarkan Tingkat resiko yaitu :

1. Risiko Rendah : NIB
2. Risiko Menengah Rendah : NIB + Sertifikat Standar (terbit otomatis)
3. Risiko Menengah Tinggi : NIB + Sertifikat Standar (melalui verifikasi)
4. Risiko Tinggi : NIB + Izin
5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

Perizinan berusaha melalui OSS dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Pemohon izin yang datang ke loket layanan DPMPTSP akan dibantu dan diarahkan untuk melakukan registrasi Akun dan Pendaftaran Izin Usaha melalui <https://oss.go.id/>. Adapun prosedur melakukan registrasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah sebagai berikut :

1. Mendaftar akun melalui oss.go.id untuk mendapatkan username dan password dengan mengisi data diri.
2. Setelah mendapat username dan password masuk untuk pengajuan perizinan berusaha
3. tambah bidang usaha / pilih jenis KBLI sesuai dengan usaha pemohon
4. Isi data yang diperlukan (misal : luas tempat usaha, alamat usaha, dan modal usaha)
5. untuk user Non UMK diperlukan persyaratan antara lain peta polygon, upload IMB/PBG jika memiliki, PKKPR/KKPR/Izin Lokasi yang telah dimiliki, gambar rencana teknis, sertifikat tanah
6. Klik Validasi Risiko untuk mengetahui risiko usaha yang dimiliki
7. Pilih deskripsi kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja
8. Tambah Produk / Jasa untuk usaha yang telah atau akan berjalan untuk jangka waktu per tahun lalu klik tombol simpan
9. Klik Selesai dan akan muncul informasi data yang telah terisi sebelumnya, cek kelengkapan dan kebenaran data dan klik lanjut untuk proses selanjutnya
10. Klik Proses Perizinan Berusaha, pilih apakah sudah memiliki dokumen persetujuan lingkungan.
11. Centang self declair / pernyataan mandiri dan klik lanjut
12. Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) muncul dan klik pernyataan dan klik terbitkan perizinan berusaha
13. NIB telah terbit dan dapat dicetak atau diunduh.

Adapun hasil pelaksanaan dari kegiatan ini yaitu :

1. Pelayanan Perizinan Berusaha OSS RBA

DPMPTSP Kabupaten Tapin melalui Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupten Tapin sesuai Tugas Utama adalah melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan Non berusaha di Kabupaten Tapin.

Pelayanan rutin yang telah dilaksanakan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tapin terdiri dari Loker 1 dan 2 untuk mengakomodir perizinan Non berusaha, Loker 3 pelayanan PKKPR serta loker 5 dan 6 untuk layanan Perizinan Berusaha OSS RBA.

Pada tahun 2024 Perizinan Berusaha yang telah terbit melalui sistem OSS RBA di Kabupaten Tapin periode 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 sebanyak **2.128 NIB**.

Rekapitulasi Izin Yang Diterbitkan Tahun 2024

<i>No</i>	<i>Nama Izin</i>	<i>Manual</i>	<i>JUMLAH</i>	<i>Ket</i>
1	Surat Izin Praktik Bidan	SIPB	137	Sektor Kesehatan (2)
2	Surat Izin Praktik Bidan Mandiri	SIPBM	8	Sektor Kesehatan (2)
3	Surat Izin Praktik Dokter Umum	SIPD	36	Sektor Kesehatan (2)
4	Surat Izin Praktik Dokter Gigi	SIPDG	54	Sektor Kesehatan (2)
5	Surat Izin Praktik Dokter Mandiri	SIPD Mandiri	5	Sektor Kesehatan (2)
6	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis	SIPDS	18	Sektor Kesehatan (2)
7	Surat Izin Praktik Fisioterapis	SIPF	1	Sektor Kesehatan (2)
8	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien	SIPRO	2	Sektor Kesehatan (2)
9	Surat Izin Praktik Perawat	SIPP	116	Sektor Kesehatan (2)
10	Surat Izin Praktik Apoteker	SIPA	32	Sektor Kesehatan (2)
11	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Lab. Medik	SIP-ATLM	25	Sektor Kesehatan (2)
12	Surat Izin Praktik Gigi dan Mulut	SIPTGM	20	Sektor Kesehatan (2)
13	Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian	SIPTTK	48	Sektor Kesehatan (2)
14	Surat Izin Praktik Elektromedis	SIP-E	1	Sektor Kesehatan (2)

15	Surat Izin Praktik Rekam Medis	SIPRM	24	Sektor Kesehatan (2)
16	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	SIPTGz	18	Sektor Kesehatan (2)
17	Surat Izin Praktik Penata Anastesi	SIPPA	4	Sektor Kesehatan (2)
18	Surat Izin Praktik Radiografer	SIPR	6	Sektor Kesehatan (2)
19	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	SIPTS	8	Sektor Kesehatan (2)
20	Surat Izin Praktik Psikologi Klinis	SIP-PK	1	Sektor Kesehatan (2)
21	Surat Izin Klinik Pratama		1	Sektor Kesehatan (2)
22	Surat Izin Optikal	SIO	2	Sektor Kesehatan (2)
23	Izin Operasional TK & PAUD		22	Sektor Pendidikan (2)
24	Penelitian		20	Sektor Pendidikan (2)
25	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat	PKBM	4	Sektor Pendidikan (2)
26	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	LPK	1	Sektor Pendidikan (2)
27	Izin Operasional SD,SMP, SMA		3	Sektor Pendidikan (2)
28	Izin Pengelolaan Air Limbah	IPAL	0	Sektor Lingkungan Hidup (2)
29	Izin Tempat Pembuangan Sementara B3	TPS-B3	0	Sektor Lingkungan Hidup (2)
30	Reklame		48	Sektor Perdagangan (1)
31	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Dinas Sosial)	LKSA	2	
32	Izin Usaha Industri	IUI	0	Sektor Perindustrian (1)
33	Izin Trayek		0	Sektor Perhubungan (1)
<b>Jumlah</b>			<b>667</b>	
	<b>Nama Izin</b>	<b>SISTEM</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Ket</b>
1	Persetujuan Bangunan Gedung	SIMBG	54	-
2	Online Single Submassion	OSS	2128	-
<b>Jumlah</b>			<b>2182</b>	
<b>No</b>	<b>Profesi</b>	<b>Sistem</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Ket</b>
1	Apoteker	MPP-D	8	Sektor Kesehatan (2)
2	Bidan Profesi	MPP-D	4	Sektor Kesehatan (2)
3	Bidan Vokasi	MPP-D	11	Sektor Kesehatan (2)
4	Bidan Vokasi Level 5	MPP-D	6	Sektor Kesehatan (2)
5	Bidan Vokasi Level 6	MPP-D	2	Sektor Kesehatan (2)
6	Dokter	MPP-D	4	Sektor Kesehatan (2)
7	Dokter Gigi	MPP-D	1	Sektor Kesehatan (2)
8	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	MPP-D	1	Sektor Kesehatan (2)
9	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik	MPP-D	1	Sektor Kesehatan (2)
10	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	MPP-D	1	Sektor Kesehatan (2)
11	Ners	MPP-D	12	Sektor Kesehatan (2)

12	Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	MPP-D	1	Sektor Kesehatan (2)
13	Perawat Vokasi	MPP-D	16	Sektor Kesehatan (2)
14	Perawat Vokasi Level 5	MPP-D	3	Sektor Kesehatan (2)
15	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik	MPP-D	2	Sektor Kesehatan (2)
16	Tenaga Vokasi Farmasi	MPP-D	6	Sektor Kesehatan (2)
<b>Jumlah</b>			<b>79</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN IZIN YANG DITERBITKAN TAHUN 2024 YAITU 2.928 IZIN</b>				

## 2. Pelayanan Keliling Perizinan Berusaha OSS RBA

Di tahun 2024 ini, DPMPTSP Kabupaten Tapin melaksanakan Pelayanan Keliling di 12 Kecamatan. Lokasi yang menjadi sasaran adalah tempat – tempat keramaian pada kecamatan masing-masing, seperti pasar, kantor desa/kelurahan ataupun kantor kecamatan.

Tabel 1. Data Penerbitan NIB, Layanan Keliling Tahun 2024

NO	JADWAL LAYANAN KELILING	LOKASI PELAYANAN		JUMLAH NIB
		KECAMATAN	ALAMAT	
1	Senin, 28.10.2024	Tapin Tengah	Kantor Desa Sukaramai	64
2	Selasa, 29.10.2024	Binuang	Pendopo Kelurahan Binuang	52
3	Rabu, 30.10.2024	Piani	Pasar Miawa	33
4	Kamis, 31.10.2024	Tapin Selatan	Pasar Tambarangan	42
5	Senin, 4.11.2024	Candi Laras Utara	Kantor Kecamatan	2
6	Selasa, 5.11.2024	Salam Babaris	Kantor Desa Salambabaris	9
7	Rabu, 6.11.2024	Hatungun	Kantor Kecamatan	14
8	Kamis, 7.11.2024	Lokpaikat	Kantor Lokpaikat	15
9	Senin, 11.11.2024	Candi Laras Selatan	Pasar Margasari	24
10	Selasa, 12.11.2024	Bakarangan	Kantor Kecamatan Bakarangan	3
11	Rabu, 13.11.2024	Tapin Utara	Pasar Keraton	2

12	Rabu, 14.11.2024	Bungur	Pendopo Kecamatan Bungur	1
<b>JUMLAH</b>				<b>261</b>

### 3. Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha

Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan perizinan berusaha bagi Masyarakat/pelaku usaha di Kabupaten Tapin. Salah satu upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin adalah bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa se Kabupaten Tapin dalam bentuk memberikan bimbingan teknis bagi Pegawai di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Bimbingan teknis yang dilaksanakan pada Aula Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tapin mengundang 2 (dua) orang peserta dari Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Materi yang disampaikan regulasi dan penyampaian tata cara pembuatan Perizinan Berusaha secara *online* melalui aplikasai OSS RBA oleh Narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan kegiatan ini, diharapkan Masyarakat wilayah masing-masing dapat memperoleh informasi Perizinan Berusaha dan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dapat melayani langsung pelalu usaha di wilayahnya.

### 4. Gebyar NIB

Gebyar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko OSS RBA di laksanakan dalam 2 kelompok kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Tapin ke 59. Kegiatan pertama di laksanakan dengan mendatangi/kunjungan ke pasar-pasar yang dianggap memiliki potensi pembuatan izin usaha bagi pedagang sekitar berdasarkan monitoring dan evaluasi pelayanan keliling sebelumnya. 4 (empat) Kecamatan yang dilaksanakan Pelayanan Gebyar NIB adalah Kecamatan Binuang, Kecamatan Piani, Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Tapin Utara.

Kelompok kedua, Gebyar NIB dilaksanakan pada *stand* DPMPSTP Tapin Expo 2024. Pelayanan Perizinan Berusaha ini, antusias pengunjung tidak terlalu ramai untuk membuat izin usaha. Pengunjung yang membuat izin usaha diberikan souvenir oleh Petugas Pelayanan

yang bertugas. Kegiatan ini dilaksanakan selama pelaksanaan Tapin Expo 2024 sejak 10 Desember 2024 s/d 18 Desember 2024.

Tabel 2. Data Penerbitan NIB Pada Gebyar Tahun 2024

NO	JADWAL LAYANAN KELILING	LOKASI PELAYANAN		JUMLAH NIB
		KECAMATAN	ALAMAT	
1	Selasa, 3.12.2024	Piani	Pendopo Desa Batung	54
2	Rabu, 4.12.2024	Binuang	Pasar Baru Binuang	78
3	Kamis, 5.12.2024	Tapin Utara	Pasar Rantau	22
4	Senin, 9.12.2024	Candi Laras Selatan	Pasar Margasari	6
<b>JUMLAH</b>				<b>160</b>

#### Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dana yang tersedia Rp215.604.510,00 Terealisasi 99,70%. Terlaksananya kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan terserapnya anggaran Rp214.950.600,00.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

##### 1. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan masyarakat (SKM)

Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin bekerjasama dengan Consultant / Tenaga Ahli sebanyak 5 Orang selama periode Januari – Desember 2024.

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat adalah :



- Tingkat kepuasan masyarakat / para pemohon izin dapat terukur, bagi penyelenggara perizinan sebagai sarana evaluasi, inovasi untuk membenahi dan meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Mengetahui kelemahan / kekurangandari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
- Mengetahui Laporan Survey Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik.
- Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan public dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.
- Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

#### Hasil Kegiatan :

- Tersusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Tapin
- Indeks Kepuaasan Masyarakat DPMPTSP Tahun 2024 sebagai berikut:  
Semester I 94,22 Kategori Sangat Baik  
Semester II 86,24 Kategori Baik
- Indeks Kepuaasan Masyarakat Mal Pelayanan Publik Tahun 2024 sebagai berikut :  
Triwulan I 94,22 Kategori Sangat Baik  
Triwulan II 87,28 Kategori Baik

Triwulan III 85,96 Kategori Baik

Triwulan IV 89,53 Kategori Sangat Baik

- terselesaikannya pengaduan dari masyarakat terkait peningkatan pelayanan di bidang penanaman modal yang masuk baik melalui tatap muka, surat, kotak pengaduan, pesan singkat secara elektronik (SMS), email, LAPOR, maupun melalui aplikasi SP4N Lapor.

## 2. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Terkait Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Tujuan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik Terkait Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat adalah menyampaikan kebijakan dari Peraturan Pemerintah sesuai dengan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Tapin terhadap kualitas pelayanan yang ada pada Mal Pelayanan Publik, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin Dapat Meningkatkan Kualitas Pelayanan dari Waktu ke waktu. Melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik terkait pelaksanaan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat yang melibatkan stakeholder terkait, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tapin akan terus berupaya dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima serta mewujudkan citra positif aparatur pemerintah dibidang pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Adapun manfaat dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik Terkait Pelaksanaan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat adalah :

- Mengetahui kelemahan atau kekurangan kinerja masing – masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tapin
- Memperoleh masukan dan saran dari para peserta terkait dengan pelayanan publik yang diberikan
- Mengelola dan menindaklanjuti masukan dan saran dari para peserta.
- Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi bagi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peserta kegiatan Forum Konsultasi Publik terkait Pelaksanaan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin di selenggarakan oleh Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin yang di ikuti oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, SKPD Teknis yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik Tahun 2024, Instansi Vertikal, Para Pelaku Usaha, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Notaris, Forum Anak, Perwakilan Bidan, dan Perwakilan Perawat yang ada di Kabupaten Tapin berjumlah 50 orang. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23

April 2024 bertempat di Aula Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tapin Jalan H. Hasan Basery Rantau.

1. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dana yang tersedia Rp137.149.580,00 Terealisasi 53,47%. Terlaksananya kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan terserapnya anggaran Rp73.330.000,00.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko DPMPTSP Kabupaten Tapin Tahun 2024 antara lain :

- a. Dapat melakukan pemantauan dan pengkajian administratif dan analisa teknis terhadap permohonan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Identifikasi permasalahan penyelenggaran pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko di DPMPTSP Kabupaten Tapin sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan maupun non perizinan.
- c. Didapatkannya hasil kajian teknis terhadap permohonan perizinan berusaha berbasis risiko terutama terhadap permasalahan atau kendala yang dihadapi yang dituangkan dalam surat atau Berita Acara dalam rangka memberikan rekomendasi layak atau tidak layaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan untuk diterbitkan atau ditolak.

- d. Terpenuhinya sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Tapin menuju pelayanan prima, profesional dan berintegritas.

Adapun pelaksanaan rapat koordinasi DPMPTSP dengan Dinas Teknis yang terkait pelaksanaan perizinan di daerah sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi DPMPTSP Kab. Tapin dengan Dinas Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Hari / Tanggal: Rabu, 24 Juli 2022

Tempat : Aula MPP Kab. Tapin

Agenda : Rapat perizinan berusaha dan non berusaha sektor kesehatan

Peserta Rapat : DPMPTSP Tapin, Dinkes Tapin dan Organisasi Profesi Kesehatan

Hasil Rapat : Pembahasan pemenuhan persyaratan perizinan fasyankes melalui aplikasi OSS RBA dan persyaratan izin praktik tenaga kesehatan

2. Rapat Koordinasi DPMPTSP Kab. Tapin dengan Dinas Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Hari / Tanggal: Kamis, 10 Oktober 2024

Tempat : Aula MPP Kab. Tapin

Agenda : Rapat koordinasi KKPR dan RDTR Rantau Baru

Peserta Rapat : DPMPTSP Tapin, Dinas PUPR Tapin dan BPN/Kantah. Tapin

Hasil Rapat : Pembahasan permohonan perizinan berusaha sektor

ESDM terkait dengan KKPR dan RDTR

Rantau Baru

3. Rapat Koordinasi DPMPTSP Kab. Tapin dengan Dinas Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Hari / Tanggal: Jum'at, 18 Oktober 2024

Tempat : Ruang rapat Bidang Tata Ruang Dinas  
PUPR Kab. Tapin

Agenda : Rapat Evaluasi Rekomendasi Tim Teknis  
Perizinan dan Non Perizinan

Peserta Rapat : Dinas PUPR Tapin, DPMPTSP Tapin dan  
BPN/Kantah Tapin

Hasil Rapat : Pembahasan SOP dan alur proses  
PKKPR perizinan

berusaha dan non berusaha melalui aplikasi OSS RBA  
dan manual untuk pelaku usaha UMK dan Non UMK

4. Rapat Koordinasi DPMPTSP Kab. Tapin dengan Dinas  
Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Hari / Tanggal: Rabu, 13 Maret 2024

Tempat : Dinas Kesehatan Kab. Tapin

Agenda : Rapat koordinasi perizinan berusaha  
sektor Kesehatan

Peserta Rapat : Dinas Kesehatan Kab. Tapin, DPMPTSP  
Kab. Tapin

dan Organisasi Profesi Kesehatan

5. Rapat Koordinasi DPMPTSP Kab. Tapin dengan Dinas  
Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Hari / Tanggal : Senin, 23 Desember 2024

Tempat : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Agenda : Rapat koordinasi sektor pertanian

Peserta Rapat : Dinas Pertanian Kab. Tapin, DPMPTSP  
Kab. Tapin, Dinas Pertanian Prov. Kal-Sel, DLH Kab. Tapin  
dan BPN/Kantah Tapin dan PT. Kharisma Alam Persada

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Rp6.048.619.965,00</b>	<b>Rp5.624.803.469,00</b>	<b>92,99%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp156.141.400,00</b>	<b>Rp146.346.000,00</b>	<b>93,73%</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp156.141.400,00	Rp146.346.000,00	93,73%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp3.438.010.440,00</b>	<b>Rp3.202.356.874,00</b>	<b>93,15%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.349.041.440,00	Rp3.122.182.274,00	93,23%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Rp88.969.000,00	Rp80.174.600,00	90,12%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp1.538.307.400,00</b>	<b>Rp1.453.575.261,00</b>	<b>94,49%</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp169.386.300,00	Rp126.493.257,00	74,68%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp176.742.600,00	Rp167.241.900,00	94,62%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp20.427.000,00	Rp14.748.000,00	72,20%
Penyediaan Bahan / Material	Rp53.529.500,00	Rp53.529.500,00	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.118.222.000,00	Rp1.091.562.604,00	97,62%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp92.773.700,00</b>	<b>Rp92.604.800,00</b>	<b>99,82%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp83.239.100,00	Rp83.204.800,00	99,96%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp9.534.600,00	Rp9.400.000,00	98,59%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp543.780.620,00</b>	<b>Rp469.962.863,00</b>	<b>86,43%</b>

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp256.001.100,00	Rp194.627.245,00	76,03%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp287.779.520,00	Rp275.335.618,00	95,68%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp279.606.405,00</b>	<b>Rp259.957.671,00</b>	<b>92,97%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp99.326.438,00	Rp80.309.206,00	80,85%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp28.967.967,00	Rp28.343.465,00	97,84%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp151.312.000,00	Rp151.305.000,00	100,00%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp460.324.350,00</b>	<b>Rp437.980.850,00</b>	<b>95,15%</b>
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Rp225.575.650,00</b>	<b>Rp203.817.150,00</b>	<b>90,35%</b>
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp150.703.500,00	Rp129.020.500,00	85,61%
Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp74.872.150,00	Rp74.796.650,00	99,90%
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten / Kota</b>	<b>Rp234.748.700,00</b>	<b>Rp234.163.700,00</b>	<b>99,75%</b>
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Rp234.748.700,00	Rp234.163.700,00	99,75%
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp142.241.000,00</b>	<b>Rp124.302.600,00</b>	<b>87,39%</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Rp142.241.000,00</b>	<b>Rp124.302.600,00</b>	<b>87,39%</b>
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Rp142.241.000,00	Rp124.302.600,00	87,39%
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp652.382.090,00</b>	<b>Rp546.270.600,00</b>	<b>83,73%</b>



<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Wewenang Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Rp652.382.090,00</b>	<b>Rp546.270.600,00</b>	<b>83,73%</b>
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Rp299.628.000,00	Rp257.990.000,00	86,10%
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp215.604.510,00	Rp214.950.600,00	99,70%
Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp137.149.580,00	Rp73.330.000,00	53,47%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp607.204.000,00</b>	<b>Rp420.833.000,00</b>	<b>69,31%</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Rp607.204.000,00</b>	Rp420.833.000,00	69,31%
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp86.634.000,00	Rp200.000,00	0,23%
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Rp318.086.000,00	Rp306.142.600,00	96,25%
Pengawasan Penanaman Modal	Rp202.484.000,00	Rp114.490.400,00	56,54%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp52.363.500,00</b>	<b>Rp43.200.000,00</b>	<b>82,50%</b>
<b>Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Secara Terintegritas Secara Elektronik</b>	<b>Rp52.363.500,00</b>	Rp43.200.000,00	82,50%
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritasi Secara Elektronik	Rp52.363.500,00	Rp43.200.000,00	82,50%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp7.963.134.905,00</b>	<b>Rp7.197.390.519,00</b>	<b>90,38%</b>

Sumber : Rincian Kartu Kendali Sub Kegiatan (aplikasi SIPANDA)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun n ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun n. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun n ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2024 Sasaran Strategis DPMPTSP ada yaitu (1) Meningkatnya Nilai Investasi Daerah dengan indikator kinerja utama Nilai Investasi PMA dan PMDN dan Persentase Peningkatan Investasi Daerah ; (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan dengan indikator Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non; (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah ; (4) Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah.

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>1</b>	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp 1.530 Milyar	Rp 1.829,26 Milyar	119,56%
		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	5%	24,87%	497,40%
<b>2</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan maupun Non Perizinan	87,5	88,98	101,69%
<b>3</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	79,70	103,51%
<b>4</b>	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	65	76,11	117,09%

Kategori capaian kinerja mengacu pada Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017* :

<b>No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Rata-Rata % Capaian</b>
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil dari capaian kinerja DPMPTSP masuk kedalam kategori Sangat Tinggi. Hasil ini tidak terlepas dari komitmen dan usaha yang telah dilaksanakan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Dukungan sarana prasarana dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dan memaksimalkan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah cepatnya perubahan regulasi

terkait pelaksanaan perizinan di daerah, kurangnya promosi kepada calon investor tentang peta potensi dan peluang investasi di Kabupaten Tapin, serta kurangnya peningkatan kompetensi untuk SDM baik yang pada Bidang maupun Sekretariat, serta pada tahun anggaran yang akan datang tidak adanya dukungan dana DAK Fasilitas Penanaman Modal.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi yang lebih baik antara DPMPTSP dengan Dinas-Dinas Teknis khususnya rapat-rapat tim teknis perizinan dalam membahas kendala dan permasalahan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko. Diharapkan di Tahun 2025 telah updating regulasi terkait pelaksanaan perizinan
2. Perlunya promosi yang lebih intensif untuk memperkenalkan peluang potensi unggulan yang ada di Kabupaten Tapin. Selain itu melaksanakan forum ataupun seminar bisnis sebagai wadah untuk promosi dan pengambangan iklim investasi secara langsung kepada calon investor.
3. Tersedianya sarana prasarana dan SDM dibidang IT yang menunjang untuk pembentukan Mal Pelayanan Publik Digital dan Peningkatan kompetensi bagi seluruh ASN DPMTSP.
4. Dukungan dana APBD sehubungan dengan tidak adanya dana DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal ditahun anggaran yang akan datang.

Demikian penyajian LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin tahun 2024 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Rantau 15 Februari Tahun 2024  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu



Hj. Fauziah, S.Sos, M.AP  
NIP. 19660107 198703 2 008